RENCANA KERJA
DINAS PERHUBUNGAN
TAHUN 2024

PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI

TAHUN 2023

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, atas rahmat dan ridho-Nya, dokumen Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri tahun 2024 telah diselesaikan. Dokumen Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2024 ini disusun sebagai implementasi tahapan kegiatan tahunan dari Rencana Strategis (RENSTRA) serta merupakan pedoman/arahan untuk rencana tindak lanjut kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri Tahun 2024.

Pada kesempatan ini, kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dalam penyusunan dokumen Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri Tahun 2024 dan diharapkan sumbang saran semua pihak untuk penyempurnaan penyusunan dokumen ini di masa mendatang.

Pada akhirnya kami berharap dokumen Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perhubungan Tahun 2024 ini dapat bermanfaat sebagai panduan serta acuan dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri guna peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Wassalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh

Kediri, 11 - 08 - 2023
Plt. KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN KEDIRI

JOKO SUWONO, S.Sos. M. AP
Pembina Utama Muda
NIP. 19750103 199311 1 001

DAFTAR ISI

		Hal.
KATA PENGANTAR ……		i
DAFTAR ISI …..……		ii
BAB I	PENDAHULUAN	1
1.1	Latar Belakang ……	1
1.2	Landasan Hukum.…..……	8
1.3	Maksud dan Tujuan ……	11
1.4	Sistematika Penyusunan …….	11
BAB II	HASIL EVALUASI RENJA DINAS PERHUBUNGAN TAHUN LALU ..	15
2.1	Evaluasi Pelaksanaan Renja Dishub Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Perhubungan	15
2.2	Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan.....	27
2.3	Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan	31
2.4	Review terhadap rancangan awal RKPD.....	34
2.5	Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	49
BAB III	TUJUAN DAN SASARAN DINAS PERHUBUNGAN	50
3.1	Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	50
3.2	Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Perhubungan	52
3.3	Rekapitulasi Program dan Kegiatan Renja Dinas Perhubungan Tahun 2024.....	53
BAB IV	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PERHUBUNGAN	62
BAB V	PENUTUP	66

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional yang meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJMPD) dengan waktu 20 (dua puluh) tahun, Rencana Pembangunan Menengah Daerah (RPJMD) dalam waktu 5 (lima) tahun dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) setiap 1 (satu) tahun.

Perangkat Daerah merupakan unsur penyelenggara pemerintahan daerah dimana untuk mencapai keberhasilannya perlu didukung dengan perencanaan yang baik sesuai dengan visi dan misi daerah serta dijabarkan dalam kerangka tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA PD) merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh setiap Perangkat Daerah. RENSTRA PD setidaknya memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program serta ukuran keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya.

RENSTRA Dinas Perhubungan merupakan penjabaran teknis dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kediri untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan. Perencanaan strategis yang jelas dan sinergis dapat mewujudkan visi misi Pemerintah Daerah Kabupaten Kediri tahun 2021- 2026 melalui pengelolaan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi perangkat daerah dalam upaya meningkatkan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah. Penyusunan Renstra Perangkat Daerah terdiri dari tahapan persiapan penyusunan rancangan Renstra Perangakat Daerah, penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah, penyusunan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah dan penetapan Renstra Perangkat Daerah.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri Tahun 2022-2026 disusun terkait dengan RPJMD Kabupaten Kediri yang merupakan penjabaran dari visi misi Bupati terpilih Tahun 2022 – 2026 sertta meengacuu kepada Renstra Kementerian Perhubungan dan Renstra Dinas Perhubungan Propinsi jawa Timur. Renstra Dinas Perhubungan selanjutnya menjabarkan dalam program dan kegiatan tahunan dengan menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) yang akan di implementasikan setiap tahun sesuai dengan struktur organisassi tata kerja serta tugas dan fungsi Dinas Perhubungan serta dilengkapi dengan kerangka anggaran.

Rencana Kerja (RENJA) tahun 2024 masuk pada tahap ke 4 RPJPD Kabupaten Kediri tahun 2005 -2025 dengan sasaran pokoknya yaitu pemantapan ketertiban, keamanan dan ketentraman serta terciptanya iklim inovasi daya saing daerah. Rencana Kerja (RENJA)

Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri Tahun 2024 merupakan tahun ke-3 (tiga) dari pelaksanaan periodisasi RPJMD Kabupaten Kediri tahun 2021 – 2026 khususnya serta kebijakan urusan bidang perhubungan di wilayah Kabupaten Kediri. Adapun keterkaitan Renstra PD dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra Prop/Kabupaten/Kota dan Renja PD dapat digambarkan sebagai berikut:

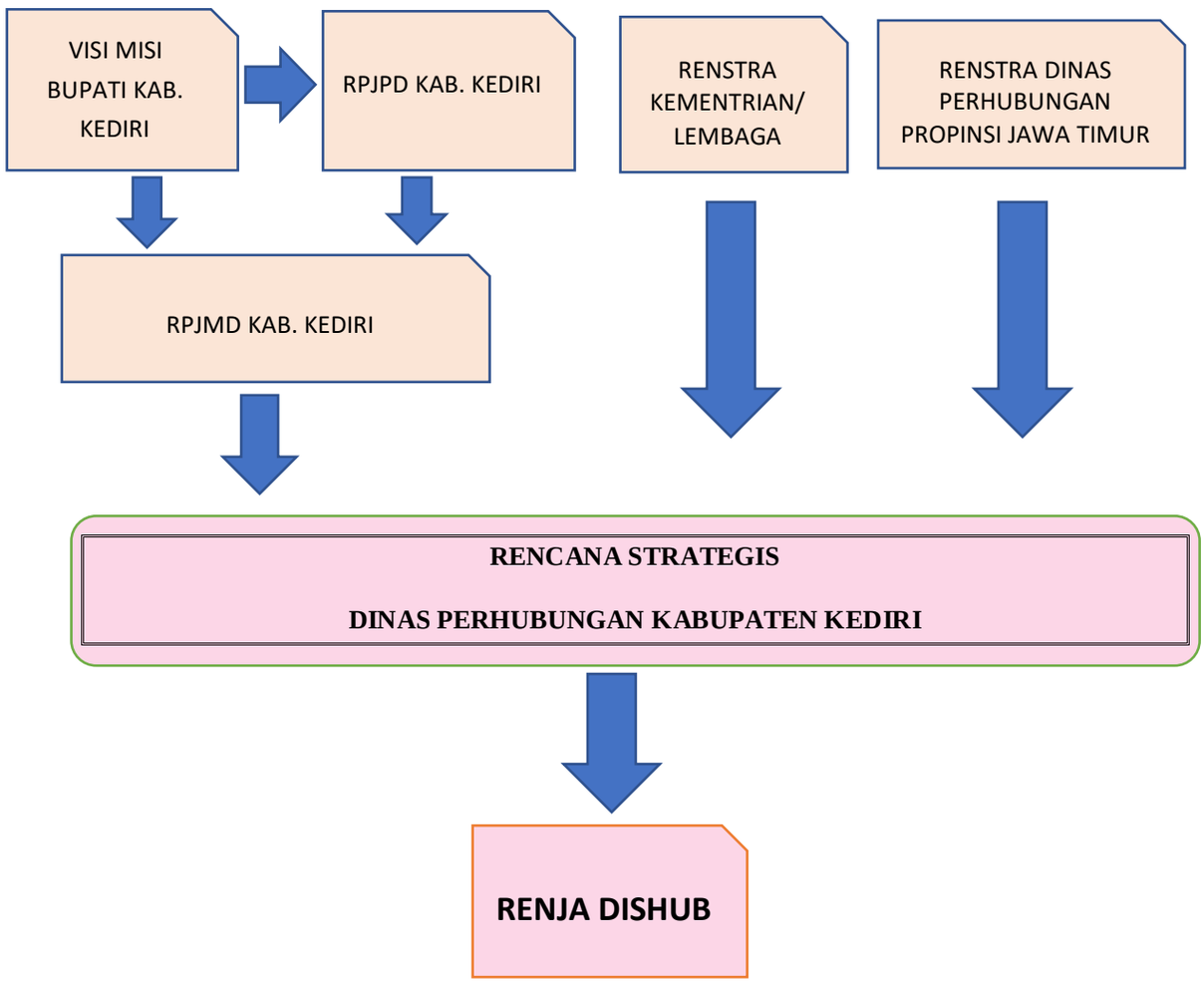

Gambar 1. Keterkaitan Renstra PD dengan RPJMD, RenstraK/L, Renstra Propinsi. Dan Renja PD

Proses penyusunan RENJA Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri Tahun 2024 didasarkan pada forum musyawarah antar bidang sebagai pelaksana yang mengimplementasikan kebijakan dalam bentuk program dan kegiatan yang tercantum pada rencana strategis Dinas Perhubungan Tahun 2021 – 2026. Oleh karena itu, program-program pembangunan di bidang perhubungan dituangkan dalam RENJA Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri tahun 2023 yang selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan kebijakan umum di bidang perhubungan, berupa prioritas dan plafon anggaran sementara.

Adapun RENJA tersebut mempunyai fungsi pokok :

1. Sebagai pedoman bagi seluruh pelaksana di bidang perhubungan untuk menyusun program dan kegiatan, karena memuat arah kebijakan pembangunan di bidang perhubungan;

2. Sebagai pedoman dalam menyusun usulan anggaran kegiatan di bidang perhubungan;
3. Menciptakan kepastian kebijakan, karena memuat komitmen Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri.

Pendanaan yang menunjang pelaksanaan setiap program dan kegiatan harus menyesuaikan dengan sumber daya dan kemampuan keuangan Pemerintah Kabupaten Kediri serta mengacu pada prioritas pembangunan daerah. Pelaksanaan setiap program dalam RENJA diselenggarakan berdasarkan pada prinsip-prinsip untuk mewujudkan *Good Governance dan Good Corporate Governance* untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat/ swasta dalam proses dan implementasi kebijakan di bidang perhubungan. Oleh karena itu, Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri perlu menyusun Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2024 guna mendukung pencapaian visi misi Pemerintah Kabupaten Kediri tahun 2024.

A. SUSUNAN ORGANISASI

Pembentukan kelembagaan Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri dilatar belakangi adanya penyerahan sebagian urusan bidang lalu lintas dang angkutan jalan (LLAJ) dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah Tingkat I dan Tingkat II sebagaimana yang di atur dalam Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan sebagian urusan Pemerintah dalam bidang LLAJ kepada Dati I dan Dati II. Sehubungan dengan itu pada tahun 1997 dibentuklah Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Daerah (DLLAJD)

Selanjutnya seiring dengan dinamika dan tuntutan masyarakat terhadap peningkatan kualitas pelayanan di segala aspek kehidupan sebagai dampak krisis multi dimensi yang berkepanjangan, maka tercetuslah era reformasi. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah mengambil kebijakan dengan paradigma baru dari pola *sentralisasi* menjadi *desentralisasi* atau yang lebih popular dengan sebutan *Otonomi Daerah*. Berkaitan dengan semakin bertambahnya kewenangan yang ditangani oleh Dinas LLAJD serta konsekuensi pelaksanaan otonomi daerah tersebut, maka diadakan perubahan nomenklatur kelembagaan dari Dinas LLAJD menjadi Dinas Perhubungan.

Kelembagaan Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri di atur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kediri (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 147), yang ditindak lanjuti dengan Peraturan Bupati Kediri Nomor 54 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organsasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri.

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Kediri Nomor 54 Tahun 2016 dibentuk susunan organisasi Dinas Perhubungan terdiri dari :

a. Kepala Dinas;
b. Sekretariat , terdiri dari :
    1. Kepala Sub Bagian Program;
    2. Kepala Sub Bagian Keuangan;

3. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

c. Bidang Lalu Lintas, terdiri dari :

1. Kepala Bidang

2. Kepala Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas;

3. Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Lalu Lintas;

d. Bidang Angkutan, terdiri dari:

1. Kepala Bidang;

2. Seksi Angkutan Orang dan Terminal;

3. Seksi Angkutan Barang dan Angkutan Khusus;

e. Bidang Pengendalian dan Operasional, terdiri dari:

1. Kepala Bidang;

2. Kepala Seksi Ketertiban dan Keselamatan;

3. Kepala Seksi Perparkiran.

f. Bidang Pengembangan Perhubungan, terdiri dari:

1. Kepala Bidang;

2. Kepala Seksi Data dan Evaluasi;

3. Kepala Seksi Penelitian dan Pengembangan Perhubungan.

g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD):

1. Kepala UPTD

Kelompok Jabatan Fungsional

Bagan Struktur Organisasi Dinas Perhubungan sebagai berikut :

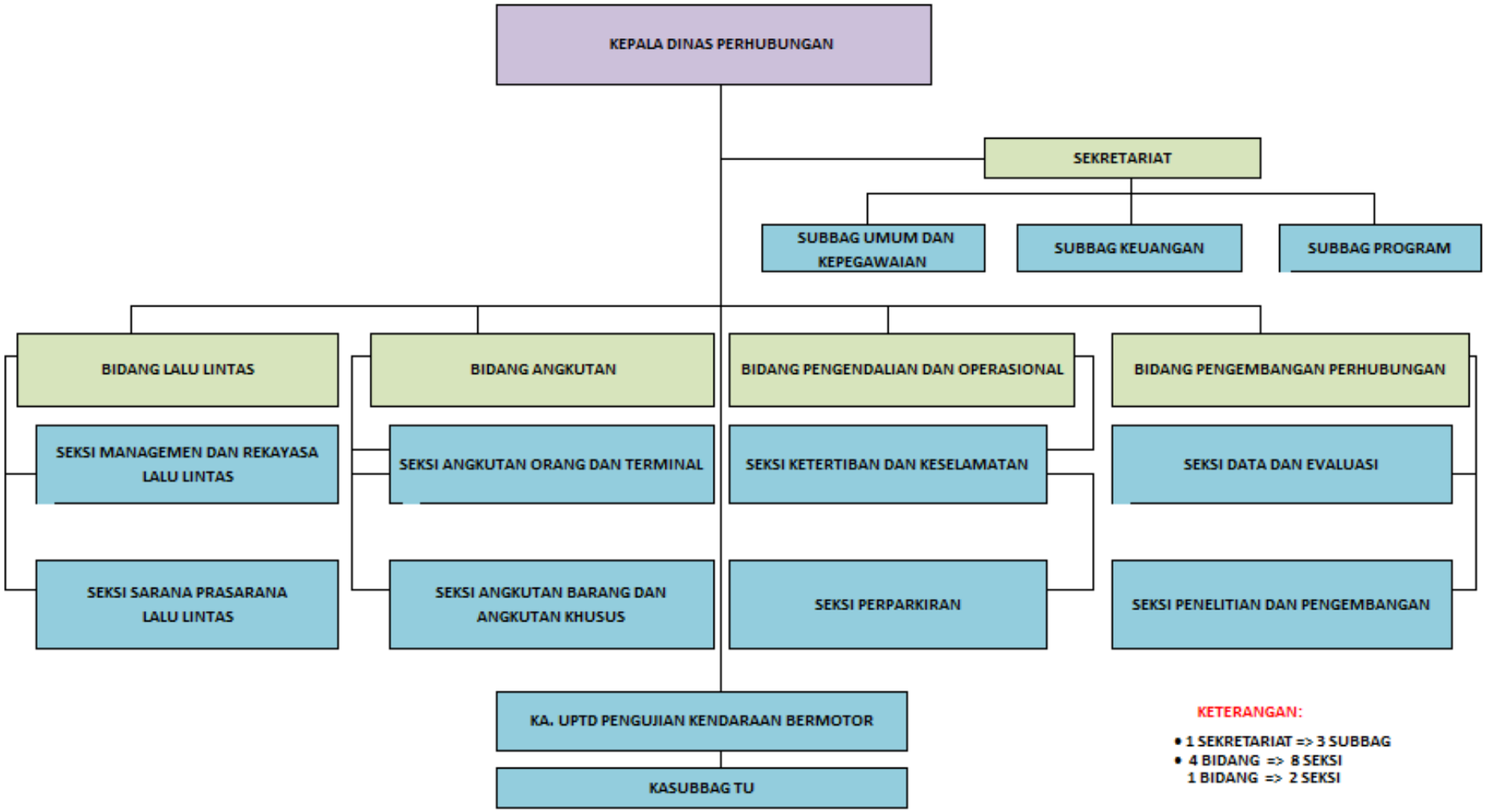
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
SEKRETARIAT
SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
SUBBAG KEUANGAN
SUBBAG PROGRAM
BIDANG LALU LINTAS
BIDANG ANGKUTAN
BIDANG PENGENDALIAN DAN OPERASIONAL
BIDANG PENGEMBANGAN PERHUBUNGAN
SEKSI MANAGEMEN DAN REKAYASA LALU LINTAS
SEKSI ANGKUTAN ORANG DAN TERMINAL
SEKSI KETERTIBAN DAN KESELAMATAN
SEKSI DATA DAN EVALUASI
SEKSI SARANA PRASARANA LALU LINTAS
SEKSI ANGKUTAN BARANG DAN ANGKUTAN KHUSUS
SEKSI PERPARKIRAN
SEKSI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KA. UPTD PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR
KASUBBAG TU
KETERANGAN:
• 1 SEKRETARIAT => 3 SUBBAG
• 4 BIDANG => 8 SEKSI
1 BIDANG => 2 SEKSI

Adapun kedudukan, tugas pokok dan fungsi, kewenangan, Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri di uraikan sebagai berikut:

1. Kedudukan.

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Kediri Nomor 54 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri bahwa *Dinas Perhubungan berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.*

2. Tugas Pokok dan Fungsi

a) Tugas Pokok **:** "Membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang perhubungan".

b) Fungsi:

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang perhubungan;
2. Penyusunan perencanaan program dan anggaran di bidang perhubungan;
3. Pelaksanaan kegiatan di bidang perhubungan;
4. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan di bidang perhubungan.
5. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan di bidang perhubungan;
6. Pembinaan penyelenggaran di bidang perhubungan;
7. Pembinaan UPTD;
8. Pelaksanaan administrasi di bidang perhubungan;
9. Penyusunan dan perumusan laporan kinerja secara periodik kepada Bupati; dan
10. Pelaksnaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

B. SUMBER DAYA MANUSIA

Sumber Daya Manusia (SDM) atau pegawai yang dimiliki Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri per 31 Juli 2023 berjumlah 89 orang, yang dipilih berdasarkan golongan dan tangka pendidikan, nampak pada rincian berikut:

1. Berdasarkan Golongan, terdiri dari:
   - Pegawai golongan IV : 5
   - Pegawai golongan III : 25
   - Pegawai golongan II : 11
   - Pegawai golongan I : 0
   - Non PNS : 48
2. Berdasarkan Tingkat Pendidikan, terdiri dari:
   - Pendidikan S2 : 5
   - Pendidikan S1 : 26
   - Pendidikan Diploma : 16
   - Pendidikan SMA/SLTA : 38

- Pendidikan SMP/SLTP : 4
- Pendidikan SD : 0

C. VISI DAN MISI

❖ VISI

Visi adalah pernyataan tentang gambaran situasi dan karakteristik yang ingin dicapai oleh suatu organisasi atau lembaga pada suatu waktu yang jauh kedepan. Visi organisasi yang ditetapkan menjadi visi bersama (*shared vision*) sehingga dapat membangun komitmen dan menggerakkan segala sumber daya organisasi, menciptakan makna bagi kehidupan anggota organisasi, menciptakan standar/tolok ukur keunggulan, dan sebagai motivasi pencapaian tujuan yang jauh ke masa depan.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kediri Tahun 2005-2025 dengan menetapkan arah kebijakan utama, yaitu untuk mencapai kondisi *"Kabupaten Kediri Yang Berakhlak, Berdaya Saing dan Sejahtera (KBBS)".*

Adapun Visi Bupati Kediri terpilih untuk periode Tahun 2021-2026, yang sekaligus menjadi Visi Pembangunan Pemerintah Kabupaten Kediri adalah "***Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Kediri yang Maju, Berkarakter Nasionalis-Religius, serta Sejahtera Berdasarkan Ekonomi Kerakyatan yang Didukung Birokrasi yang Melayani."***

❖ MISI

Selanjutnya Visi sebagaimana tersebut di atas, dijabarkan ke dalam Misi pembangunan Pemerintah kabupaten Kediri. Adapun misi pembangunan Pemerintah Kabupaten Kediri adalah:

1. Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkarakter nasionalis-religius.
2. Reformasi birokrasi dan pelayanan publik
3. Pengembangan ekonomi kerakyatan dan peningkatan investasi daerah
4. Revitalisasi pertanian untuk ketahanan dan swasembada pangan
5. Peningkatan infrastruktur dan konekfitas antar wilayah
6. Optimalisasi kepariwisataan berbasis kearifan lokal
7. Optimalisasi tata kelola lingkungan hidup, Sumber Daya Alam (SDA), dan mitigasi bencana
8. Pengembangan seni, budaya, olahraga, dan kretifitas pemuda
9. Perwujudan kemandirian desa untuk kesejahteraan masyarakat

Dalam rangka mewujudkan Visi Pembangunan Kabupaten Kediri tersebut, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mengemban salah satu dari sembilan Misi Pembangunan Kabupaten Kediri, yaitu misi yang kelima sebagai berikut: **"*Peningkatan infrastruktur dan konektivitas antar wilayah"***

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum Dinas Perhubungan yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Dinas Perhubungan, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Dinas Perhubungan yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomro 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801)
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2440, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
18. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang

Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
26. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Tahun 2009 Seri E);
28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2021 Nomor 2 Seri D);
29. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 35 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2022 Nomor 35 Seri E);

30. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kediri Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2011 Nomor 14 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 94);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 4 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2014 Nomor 4 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 133);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 176);
33. Peraturan Bupati Kediri Nomor 33 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2023 Nomor 33)

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan RENJA Tahun 2024 adalah untuk:

1. Menentukan arah kebijakan pembangunan bidang perhubungan tahun 2024;
2. Merumuskan rencana kerja Dinas Perhubungan untuk periode 1 (satu) tahun sebagai implementasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri.

Adapun tujuan penyusunannya adalah menjabarkan rencana program dan kegiatan serta menetapkan target-target kinerja serta pendanaan indikatif tahunan sebagai bentuk komitmen organisasi bagi pencapaian kinerja yang optimal serta sebagai arah dan acuan untuk:

a) Menyusun Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran;
b) Menyusun Penilaian Kinerja Tahunan (LKjIP/LKPJ);
c) Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran;
d) Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif dan efisien, berkeadilan dan berkelanjutan;
e) Menjalin komunikasi aktif antara Pimpinan, komponen perencanaan pelaksanaan dan pengelola perencanaan kegiatan,serta pelaksanaan evaluasi kinerja;
f) Menjamin terciptanya integritas, sinkronisasi dan sinergi serta komitmen antara Sekretariat dan bidang-bidang pada Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri.

1.4 Sistematika Penyusunan

Adapun sistematika penulisan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah dengan Renja K/L dan Renja Provinsi /Kabupaten/ Kota serta tindak lanjutnya dengan proses penyusan RAPBD.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Preangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen

II. HASIL EVALUASI RENJA DINAS PERHUBUNGAN TAHUN LALU (2022)

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Memuat kajian terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (Tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1)

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.

Memuat kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.

Berisikan uraian mengenai:

1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Derah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah;
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi Kepala Daerah terhadap capaian program nasional/internasional, seperti NSPK, SPM dan SDGs (Sustainable Development Goals);
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah; dan

5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan propgram dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Berisikan uraian mengenai:

1. Proses yang dilakukan yaiotu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD;

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Deskripsi yang perlu disajikan dalam sub bab ini antara lain:

1. Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh;
2. Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

III. TUJUAN DAN SASARAN SKPD

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah

3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

3.3 Program dan Kegiatan

Berisikan penjelasan mengenai:

a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, misal:
   1) Pencapaian visi dan misi Kepala Daerah;
   2) Pencapaian SDGs;
   3) Pengentasan kemiskinan;
   4) Pencapaian NSPK dan SPM;
   5) Pendayagunaan potensi ekonomi daerah;
   6) Pengembangan daerah terisolir dsb.
b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi:
   1) Jumlah program dan jumlah kegiatan;

2) Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan
3) Total kebutuhan dana/pagu indikatof yang dirinci menurut sumber pendanaannya.

c. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya;
d. Tabel rencana program dan kegiatan

IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SKPD

Memuat uraian indikator program/kegiatan dan sumber pendanaan.

V. PENUTUP

Memuat uraian penutup, berupa:

a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.
b. Kaidah-kaidah pelaksanaan
c. Rencana Tindak Lanjut

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA DINAS PERHUBUNGAN TAHUN LALU

Pelaksanaan evaluasi sebagai salah satu fungsi peningkatan kualitas kinerja instansi pemerintah, oleh karena itu bab ini melaksanakan kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Perhubungan tahun 2022 dan perkiraan capaian tahun 2023 dengan mengacu pada APBD tahun berjalan. Selanjutnya kajian tersebut di kaitkan dengan pencapaian target RENSTRA Dinas Perhubungan berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan RENJA Dinas Perhubungan tahun-tahun sebelumnya. Hasil evaluasi ini digunakan untuk mengetahui:

1. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegaitan;
2. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program RENSTRA perangkat daerah;
3. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu di ambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

2.1 Evaluasi Pelaksanaan RENJA Dinas Perhubungan Tahun lalu dan Capaian RENSTRA Dinas Perhubungan

2.1.1 Capaian Rencana Kerja Tahun 2022

Capaian kinerja program/kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri tahun 2022 dapat dijelaskan sebagai berikut:

a) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan anggaran Rp 7.199.142.680.,- dan terealisasi sebesar Rp 7.043.597.918,- sehingga realisasi penyerapan anggaran sebesar 97,84 %, sedangkan capaian kinerja program dapat dinilai dari prosentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah dengan target 95 % dan terealisasi sebesar 97,84 % dengan capaian 100 %. Adapun rumus perhitungan prosentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah adalah (Jumlah kegiatan yang penyerapan anggaran 100% : Jumlah kegiatan yang mendukung program) X 100%. Program tersebut didukung oleh 7 kegiatan dan 21 sub kegiatan.

b) Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan anggaran Rp. 8.190.909.250,- dan terealisasi sebesar Rp. 8.116.998.943,- sehingga realisasi penyerapan 98,08 % dengan capaian indikator program sebagai berikut :

   1) Persentase peningkatan ketertiban dan keselamatan LLAJ dari target 86,25% dan realisasi 79,66% sehingga capaian kinerja sebesar 92,36%.
   2) Persentase ketersediaan kajian penyelenggaraan dan pengembangan bidang perhubungan dari target 20% tercapai realisasi 20% sehingga capaian indikator nya sebesar 100%.

3) Persentase angkutan jalanyang memenuhi standart keselamatan dengan target 97 % dan realisasi 95,5 % sehingga capaian indikatornya sebesar 98,45%.
4) Persentase ketersediaan perlengkapan jalan dengan target 11,37% dan realisasi 14,68% sehingga capaian indikatornya 129,11 %.

Pelaksanaan capaian kinerja Tahun 2022 secara umum dapat dilaksanakan dengan baik , hal ini dapat dilihat dari rata-rata capaian kinerja program sebesar 97,96 % (sangat berhasil), penyerapan anggaran tahun 2022 untuk belanja tidak langsung sebesar 77,87% (berhasil) dan belanja langsung mencapai 99,57 % (sangat berhasil) sebagaimana disajikan dalam tabel 2.1 sebagai berikut:

Tabel 2.1
Realisasi Program dan Kegiatan
Tahun Anggaran 2022

PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN PAK (Rp)	REALISASI (Rp.)	SILPA (Rp.)	CAPAIAN (%)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	**7.199.142.680**	**7.043.597.918**	**155.544.762**	**97,84**
Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**7.870.100**	**7.456.500**	**413.600**	**96,38**
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.771.800	4.599.000	172.800	96,38
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.098.300	2.857.500	240.800	92,23
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**5.866.203.015**	**5.740.329.096**	**125.873.919**	**97,85**
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.362.883.695	5.257.695.004	105.188.691	98,04
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	495.950.020	475.585.592	20.364.428	95,89
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.957.975	3.702.675	255.300	93,55
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	3.411.325	3.345.825	65.500	98,08
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**8.600.000**	**8.600.000**	**0**	**100**
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	8.600.000	8.600.000	0	100
Administrasi Umum Perangkat Daerah	**423.366.515**	**405.553.993**	**17.812.522**	**95,79**
Penyediaan komponen instansi listrik/penerangan bangunan kantor	19.701.060	18.849.750	851.310	95,68
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	143.804.530	142.985.300	819.230	99,43
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	45.750.000	43.246.700	2.503.300	94,53

PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN PAK (Rp)	REALISASI (Rp.)	SILPA (Rp.)	CAPAIAN (%)
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	10.330.500	10.300.600	29.900	99,71
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	17.442.925	15.422.675	2.020.250	88,42
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	4.800.000	4.220.000	580.000	87,92
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	177.937.500	167.528.968	10.408.512	94,15
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	3.600.000	3.000.000	600.000	83,33
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**370.591.250**	**365.301.140**	**5.290.110**	**98,57**
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	181.701.250	180.054.500	1.646.750	99,09
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	188.890.000	185.246.640	3.643.360	98,07
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**155.323.775**	**152.229.589**	**3.094.186**	**98,01**
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listirk	155.323.775	152.229.589	3.094.186	98,01
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**263.738.025**	**262.242.600**	**1.495.425**	**99,43**
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	53.810.000	53.763.300	46.700	99,91
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	39.000.0000	38.999.300	700	100
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	170.928.025	169.480.000	1.448.025	99,15
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS ANGKUTAN JALAN	**11.207.338.025**	**10.991.709.124**	**215.628.901**	**98,08**
Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	**98.769.075**	**97.654.075**	**1.115.000**	**98,87**
Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kab/Kota	98.769.075	97.654.075	1.115.000	98,87
Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	**2.769.856.700**	**2.639.476.566**	**130.380.134**	**95,29**
Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	1.958.393.300	1.845.219.567	113.173.733	94,22

PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN PAK (Rp)	REALISASI (Rp.)	SILPA (Rp.)	CAPAIAN (%)
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	811.463.400	794256.999.	17.206.401	97,88
Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	**3.121.362.650**	**3.115.145.823**	**6.216.827**	**99,80**
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	3.121.362.650	3.115.145.823	6.216.827	99,80
Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	**1.406.935.000**	**1.396.394.468**	**10.540.532**	**99,25**
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	511.495.500	503.806.050	7.689.450	98,50
Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	440.150.000	440.000.000	150.000	99,97
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	383.920.000	381.561.642	2.358.358	99.39
Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	71.369.500	71.026.776	342.724	99,52
Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jringan Jalan Kabupaten/Kota	**203.336.700**	**189.038.420**	**14.298.280**	**92,97**
Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	188.224.700	178.437.420	9.787.280	94,80
Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	15.112.000	10.601.000	4.511.000	70,15
Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk jalan Kabupaten/Kota	**10.383.000**	**8.114.000**	**2.269.000**	**78,15**
Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	10.383.000	8.114.000	2.269.000	78,15
Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	**2.061.774.700**	**2.029.781.026**	**31.993.674**	**98,45**
Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	2.061.774.700	2.029.781.026	31.993.674	98,45
Penyediaan Angkutan Umum untuk jasa Angkutan Orang dan/atau barang antar Kota dalam 1(satu) Daerah	**1.534.920.200**	**1.516.104.746**	**18.815.454**	**98,77**
Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	1.534.920.200	1.516.104.746	18.815.454	98,77
JUMLAH	**18.406.480.705**	**18.035.307.042**	**370.137.663**	**97,98**

Kinerja realisasi anggaran program dan kegiatan tahun 2022 Dinas Perhubungan secara umu dapat dikatakan mencapai tingkat efisiensi yang cukup bagus, artinya bahwa terdapat tingkat penggunaan anggaran dibawah 100 persen, namun menghasilkan keluaran (output) maupun outcome yang maksimal.

2.1.2 Evaluasi Rencana Kerja 2022 atas Rencana Strategis

Analisis teknis untuk penyusunan rencana kerja tahun 2024 dapat dilakukan melalui evaluasi hasil pelaksanaan RENJA Dinas Perhubungan tahun 2022 dan pencapaian RENSTRA Dinas Perhubungan sampai dengan Tahun 2023 (perkiraan) yang disajikan dalam tabel 2.2 berikut ini :

Tabel 2.2
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan pencapaian Renstra perangkat Daerah s/d Tahun 2022
Kabupaten Kediri

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Pogram (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaia Program (Renstra SKPD) Tahun 2024	Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program & Kegiatan Tahun Lalu (2022)					Target program/ kegiatan Renja PD 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah		Realisasi Renja Perangkat Daerah		Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program & Kegiatan s/d tahun berjalan 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6		7		8=(7/6)	9	10= (5+7+9)	11 = (10/4)
	Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar											
	Bidang Urusan Perhubungan											
1	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah**	**100 %**	**100 %**	**100 %**		**97,98 %**		**97,98**	**100 %**	**298 %**	3
	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**jumlah dokumen perencanaan,penganggaran, dan evaluasi yang tepat waktu**	**10 dok**	**89 dok**	**10 dok**		**10 dok**		**100**	**11 dok**	**31** dok	310
	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang tepat waktu	3 dok	43 dok	3 dok		3 dok		**100**	4 dok	**50** dok	1.667
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah yang tepat waktu	7 dok	46 dok	7 dok		7 dok		**100**	7 dok	**60** dok	857
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**jumlah pemenuhan administrasi keuangan perangkat daerah**	**12 bulan**	**60 bln**	**12 bln**		**12 bln**		**100**	12 bln	12 bulan	100
			20 dok	**116 dok**	**20 dok**		**20 dok**		**100**	22 dokumen		-
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pemberian gaji dan tunjangan penghasilan PNS selama 1 tahun	49 org/bulan	60 bulan	12 bulan		49 org/bulan		**408**	49 bln	**158** bln	322
	Penyediaan administrasi pelaksanaan Tugas ASN	jumlah pemenuhan administrasi pelaksanaan tugas ASN	12 bulan	60 bulan	12 bulan		12 bulan		**100**	12 bln	**84** bln	700

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Pogram (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaia Program (Renstra SKPD) Tahun 2024	Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program & Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target program/ kegiatan Renja PD 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah	Realisasi Renja Perangkat Daerah	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program & Kegiatan s/d tahun berjalan 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10= (5+7+9)	11 = (10/4)
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan yang tepat waktu	8 dok	64 dok	8 dok	8 dok	**100**	8 dok	**158** dok	1.975
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan yang tepat waktu	12 dok	52 dok	12 dok	12 dok	**100**	14 dok	**84** dok	700
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	jumlah laporan penatausahaan BMD	**24 laporan**	38 **laporan**	24 **laporan**	24 **laporan**	**100**	24 **lap**	**86** lap	358
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	jumlah laporan penatausahaan BMD	24 **laporan**	38 laporan	24 laporan	24 laporan	100	24 lap	86 lap	358
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	**jumlah pemenuhan kebutuhan administrasi umum perangkat daerah**	**12** bulan	60 bulan	**12** bulan	**12** bulan	**100**	12 bulan	**84** bulan	700
	Penyediaan komponen instansi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan yg disediakan	12 komponen	60 komp	12 komp	12 komp	**100**	12 komp	**84** komp	700
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yg disediakan	12 peralatan	60 peralatan	12 peralatan	14 peralatan	**117**	12 peralatan	**86** peralatan	717
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yg disediakan	12 peralatan	60 peralatan	12 peralatan	12 peralatan	**100**	12 peralatan	**84** peralatan	700
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yg disediakan	12 bulan	60 bulan	12 peralatan	12 bulan	**100**	12 bulan	**84** bulan	700
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	jumlah jenis barang cetakan & penggandaan yg disediakan	12 jenis	60 jenis	12 jenis	10 jenis	**83**	12 bulan	**82** bulan	683
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	jumlah bahan bacaan dan perundang-undangan yg disediakan	12 bulan	60 bulan	12 bulan	12 bulan	**100**	12 bulan	**84** bulan	700
	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah pemenuhan bahan material PKB (1 thn)	12 bulan	82 bulan	0 bulan	0 bulan	**#DIV/0!**	0 bulan	**84** bulan	700
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang Diselenggarakan	6 kali	60 bulan	12 bulan	8 bulan	**67**	6 kali keg	**74** kali keg	1.233
			24 kali	60 bulan	30 bulan	30 bulan	**100**	24 kali keg	**114** kali keg	475
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah pembayaran jasa pelayanan kearsipan	0	60 bulan	12 bulan	10 bulan	**83**	12 bulan	**82** bulan	#DIV/0!

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Pogram (Outcome)/ Kegiatan (Output	Target Kinerja Capaia Program (Renstra SKPD) Tahun 2024	Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program & Kegiatan Tahun Lalu (2022			Target program/ kegiatan Renja PD 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah	Realisasi Renja Perangkat Daerah	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program & Kegiatan s/d tahun berjalan 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10= (5+7+9)	11 = (10/4)
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									
	Pengadaan Mebel	Jumlah pengadaan mebel								
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah pengadaan peralatan dan mesin lainnya	1 unit							
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah rehab gedung kantor	1 paket							
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**jumlah pemenuhan jasa pendukung urusan pemerintah daerah**	12 bulan	60 bulan	**12** bulan	12 bulan	**100**	12 Bulan	**84** Bulan	700
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listirk	Jumlah pemenuhan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bulan	60 bulan	12 bulan	12 bulan	**100**	12 Bulan	**84** Bulan	700
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**jumlah jenis pemenuhan pemeliharaan barang milik daerah**	28 unit	100 unit	29 unit	29 unit	**100**	29 unit	**158** unit	564
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara	28 unit	100 unit	29 unit	29 unit	**100**	29 unit	**158** unit	564
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara	72 unit	9 paket	6 paket	57 paket	**950**	23 paket	**89** paket	124
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang direhab	1 paket	4 paket	1 paket	3 paket	**300**	12 paket	**19** paket	1.900

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Pogram (Outcome)/ Kegiatan (Output	Target Kinerja Capaia Program (Renstra SKPD) Tahun 2024	Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program & Kegiatan Tahun Lalu (2022			Target program/ kegiatan Renja PD 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah	Realisasi Renja Perangkat Daerah	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program & Kegiatan s/d tahun berjalan 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10= (5+7+9)	11 = (10/4)
2	**Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan**	*Persentase ketersediaan kajian penyelenggaraan LLAJ*	60 %	-	20,00 %	20,00 %	**100**	40 %	**60 %**	100
		Persentase ketersediaan perlengkapan jalan	64,37 %	**6,42 %**	15,44 %	14,68 %	**95**	36,85 %	**58 %**	90
		Persentase peningkatan ketertiban dan keselamatan LLAJ	98,00 %	**96,00 %**	97,00 %	79,66 %	**82**	97,00 %	**273 %**	278
		Persentase angkutan jalan yang memenuhi standart keselamatan	90,00 %	**78,00 %**	80,00 %	95,50 %	**119**	85,00 %	**259 %**	287
	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota		**2 dok**	-	**1 dok**	**1 dok**	**0**	**1 dok**	**2 dok**	100
	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen kajian	2 dok	-	**1 dok**	**1 dok**	**0**	**1 dok**	**2 dok**	100
	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kab/Kota	Jumlah kegiatan survey cakupan kinerja jalan	1 keg	-	-	-		-	-	-
	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kab/Kota	**jumlah perlengkapan jalan yang tersedia**	**271 unit**		**147**	**202**	**137**	**235**	**437**	161
	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kab/Kota	Jumlah Penyediaan perlengkapan jalan di jalan Kabupaten	189 unit	758 unit	108 unit	122 unit	**113**	110 unit	**990** unit	524
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah perlengkapan jalan yang dipelihara di jalan Kabupaten	82 unit	476 unit	80 unit	80 unit	**100**	125 unit	**681** unit	830

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Pogram (Outcome)/ Kegiatan (Output	Target Kinerja Capaia Program (Renstra SKPD) Tahun 2024	Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program & Kegiatan Tahun Lalu (2022			Target program/ kegiatan Renja PD 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah	Realisasi Renja Perangkat Daerah	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program & Kegiatan s/d tahun berjalan 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10= (5+7+9)	11 = (10/4)
	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	**jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi perparkiran**			**4 keg**	**4 keg**	**100**		**4**	#DIV/0!
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah juru parkir	105 org	1517 ok	105 ok	105 ok	**100**	105 OB	**1.727** ok	1.645
		jumlah kegiatan	12 kegiatan		4 keg	4 keg	**100**	12	**16**	133
	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	**jumlah pemenuhan kebutuhan PKB**	3 kegiatan		**3**	**3**	**100**	**3 keg**	**6**	200
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah terpenuhinya kebutuhan prasarana PKB	9 unit	12 unit	13 unit	13 unit	**100**	34 unit	**59** unit	656
	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah ketersediaan kartu uji (smart card)	14.300 set	51000 buku	14806 buku	13300 buku	**90**	20750 set	**85.050** set	595
	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah pemenuhan peralatan pengujian yang di pelihara	12 unit	28 unit	12 unit	12 unit	**100**	12 unit	**52** unit	433
		Jumlah penerima honor pegawai kontrak	858 ob	286 ob	12 ob	12 ob	**100**	858 ob	**1.156** ob	135
	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah kegiatan monev pelayanan publik bidang perhubungan	2 kali	21 kali	2 kali	12 kali	**600**	2 kali keg	**35** kali	1.750
		Jumlah sistem informasi perhubungan yang dikembangkan	2 sistem	6 sistem	1 sistem	1 sistem	**100**	2 sistem	**9** sistem	450
	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan	**jumlah kegiatan pelaksanaan manajemen rekayasa lalu lintas**	**2 dok**		**5 keg**	**5 keg**	**100**	**5**	**10**	500
	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan provinsi	Jumlah kegiatan pengumpulan data untuk persyaratan penilaian WTN dan survey monev perlengkapan jalan	2 dok	12 keg	5 keg	5 keg	**100**	5 kali keg	**22** kali	1.100

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Pogram (Outcome)/ Kegiatan (Output	Target Kinerja Capaia Program (Renstra SKPD) Tahun 2024	Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program & Kegiatan Tahun Lalu (2022			kegiatan Renja PD 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah	Realisasi Renja Perangkat Daerah	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program & Kegiatan s/d tahun berjalan 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	**8=(7/6)**	9	**10= (5+7+9)**	**11 = (10/4)**
	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas dan Pelaksanaan kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Penertiban Lalu Lintas & Pengendalian Lalu Lintas yang dilaksanakan	20 keg	0 keg	0	0	**#DIV/0!**	0 keg	- keg	0
	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan rapat koordinasi Forum LLAJ	4 kali keg	7 kali keg	5 kali keg	5 kali keg	**100**	6 kali keg	18 kali	450
	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	**jumlah kegiatan Andal Lalin**	5 dok	9 dok	2 dok	2 dok	**100**	**dok** **5**	16 dok	320
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Jumlah persetujuan hasil Analisis Dampak lalu Lintas (ANDALLALIN) untuk jalan Kabupaten	5 dok	9 dok	5 dok	5 dok	**100**	5 **dok**	19 kali	380
	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Jumlah kegiatan						48 keg		
	Pelaksanaan Inspeksi, Audit & Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah kegiatan	0 keg	0	54 keg	37 keg	**69**	48 keg	85	#DIV/0!
	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	**jumlah kegiatan pengendalian dan pengawasan pelayanan angkutan orang/barang**	**36 kegiatan**		**45** kali keg	**45** kali keg	**100**	**36 keg**	81	225
	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah pemenuhan karcis penyeberangan air	0 lembar	5740 lembar	545 lembar	0 lembar	**0**	858 bendel	6.598 bendel	#DIV/0!
		Jumlah kegiatan Monev pelayanan angkutan orang	11 kali keg	104 kali keg	45 kali keg	96 kali keg	**213**	36 kali keg	236 kali	2.145
		Jumlah pemenuhan pembayaran gaji tenaga kontrak bidang Angkutan	12 org/bln	286 ob	26 ob	26 ob	**100**	11 ob	323 ob	**2.692**

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Pogram (Outcome)/ Kegiatan (Output	Target Kinerja Capaia Program (Renstra SKPD) Tahun 2024	Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program & Kegiatan Tahun Lalu (2022				kegiatan Renja PD 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah		Realisasi Renja Perangkat Daerah		Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program & Kegiatan s/d tahun berjalan 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6		7		8=(7/6)	9	10= (5+7+9)	11 = (10/4)
	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam trayek Lintas Daerah Kab/Kota dalam 1 (satu) daerah Kab/Kota	Jumlah kegiatan monev. Angkutan barang			-		-		#DIV/0!	-	-	#DIV/0!
	Koordinasi & sinkronisasipengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek kewenangan Kab./kota	Jumlah kegiatan monev. Angkutan barang			-		-		#DIV/0!	-	-	#DIV/0!

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan

Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi bidang perhubungan berupaya untuk selalu bersikap dan bertindak proaktif, kreatif, inovatif serta profesional sesuai dengan tanggung jawab dan kewenangan pelayanan publik bidang perhubungan. Disamping sebagai dinas teknis bidang perhubungan, Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri juga diberi tanggung jawab sebagai salah satu dinas penghasil untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) berupa retribusi parkir di tepi jalan umum, retribusi pengujian kendaraan bermotor, retribusi terminal, retribusi ijin trayek dan retribusi penyeberangan orang (penyebrangan sungai).

Berdasarkan hal tersebut, maka gambaran analisis kinerja pelayanan Dinas Perhubungan dengan menggunakan Indikator Kinerja Utama (IKU) serta menyesuaikan kondisi setiap tahun, dapat dijelaskan sebagaimana rincian dalam tabel 2.3 berikut ini:

Tabel 2.3

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri

Tahun 2021– Tahun 2024

No	Indikator Kinerja	SPM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Transportasi	-	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Transportasi	60	65	70	75	84.15	86.48	86.59	86.75	Indikator Tujuan Dishub
2	Cakupan kinerja pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan	-	Jumlah ruas jalan dg pelayanan LLAJ yang baik /jumlah ruas jalan yg di kontrol x 100 %	60	65	70	75	60	65	70	75	Indikator Sasaran Dishub
3	Persentase ketersediaan kajian penyelenggaraan dan Pengembangan Bidang Perhubungan	-	Penyelenggaraan Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ)	0	20	40	60	0	20	40	60	Indikator Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ)

No	Indikator Kinerja	SPM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	Persentase ketersediaan perlengkapan jalan	-	(Jml perlengkapan jalan yang tersedia th n + Jml penyediaan perlengkapan jalan th n-1) / Jml kebutuhan perlengkapan jalan x100%	3.76	11.37	32.86	54.79	6.18	14.68	32.86	54.79	Indikator Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ)
5	Persentase peningkatan ketertiban dan keselamatan LLAJ	-	jml kend yang tidak melanggar / jml kend yg di operasi x 100 % (dg cat. Target yg di operasi harus sama setiap tahun)	85.83	86.25	86.67	87.08	86.24	79.66	86.67	87.08	Indikator Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ)
6	Persentase angkutan jalan yang memenuhi standart keselamatan	-	Jml kendaraan lulus uji /Jml kendaraan yg wajib uji x 100 %	96	97	97	98	96	97	97	98	Indikator Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ)

Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan jika dilihat Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri sebagai dinas penghasil maka dapat digambarkan capaian kinerja pemenuhan Pendapatan Asli Daerah bidang perhubungan tahun 2022 sebagai berikut:

Tabel 2.4

Capaian PAD Dinas Perhubungan Tahun 2022

KODE REKENING					URAIAN	TARGET	REALISASI	Capaian Kinerja	
								(Rp)	(%)
1					2	3	4	5	6
4					**PENDAPATAN**	**11.077.645.650**	**12.022.783.650**	**945.138.000**	**108,53**
4	**1**				**PENDAPATAN ASLI DAERAH**	**11.077.645.650**	**12.022.783.650**	**945.138.000**	**108,53**
4	**1**	**2**			**Hasil Retribusi Daerah**	**11.077.645.650**	**12.022.783.650**	**945.138.000**	**108,53**
4	**1**	**2**	**01**		**Retribusi Jasa Umum**	**11.031.135.000**	**11.975.878.000**	**944.743.000**	**108,56**
4	1	2	01	19	Retribusi Pelayanan Parkir di tepi jalan umum	9.795.786.00	10.548.390.000	752.604.000	107,68
4	1	2	01	45	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	1.235.349.000	1.427.488.000	192.139.000	115,55
4	**1**	**2**	**02**		**Retribusi Jasa Usaha**	**46.405.650**	**46.905.650**	**500.000**	**101,08**
4	1	2	02	01	Retribusi pemakaian kekayaan daerah penyewaan tanah dan bangunan	3.832.500	3.832.500	0	100,00
4	1	2	02	14	Retribusi terminal tempat kegiatan usaha	35.062.500	35.562.500	500.000	101,43
4	1	2	02	24	Retribusi Penyeberangan orang	7.510.650	7.510.650	0	100,00
4	**1**	**2**	**03**		**Retribusi Perizinan tertentu**	**105.000**	**0**	**(105.000)**	**0**
4	1	2	03	13	Retribusi Izin trayek	105.000	0	(105.000)	0

Hasil pencapaian pendapatan Dinas Perhubungan pada tahun 2022 menunjukkan angka yang positif, dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 11.077.645.650 yang telah direalisasikan bisa mencapai Rp. 12.022.783.650 atau 108,53 % target telah tercapai. Hal ini menunjukkan kinerja pencapaian pendapatan yang baik pada Dinas Perhubungan .

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Dinas Perhubungan

Dalam catatan Kementrian Perhubungan (Kemenhub) terdapat lima masalah besar yang tengah melilit sektor transportasi darat di Indonesia saat ini, yaitu:

- Pengelolaan transportasi darat belum efisien dan efektif terutama di daerah tertinggal, terluar dan terdalam (3T);
- Kurangnya rasa kebersamaan dalam penggunaan transportasi darat seperti egois pengemudi yang kerap terjadi di jalan raya;
- Masih mengabaikan aspek keselamatan yang berpotensi mengakibatkan kecelakaan lalu lintas (laka lantas);
- Angkutan massal yang belum merata terutama diwilayah pedesaan;
- Tingginya penggunaan kendaraan pribadi, yang di akibatkan oleh belum terintegrasinya antar sektor transportsi umum.

Sementara itu, isu-isu yang berkembang pada konteks regional, nasional maupun global adalah dikembangkannya sistem transportasi masaal, konvensi bahan bakar fosik ke gas bahkan sudah mengarah ke sistem transportasi yang digerakkan dengan listirik dan memaksimalkan *intelegensia trasnport management* (manajemen transportasi yang cerdas) sehingga menyediakan layanan inovatif terkait moda trasportasi dan manejemen lalu lintas yang berbeda.

Adapun beberapa isu yang mengemuka di bidang transportasi yang sampai dengan saat in masih aktual adalah:

1. Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka Organisasi dan rincian tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri serta Peraturan Daerah tentang penyelenggaraan perhubungan harus disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tersebut;
2. Transportasi multi moda diperlukan untuk mengarah ke *seamless trasport.(transportasi yang lancar);*
3. Perlunya penataan transportasi perkotaan yang memiliki kondisi lingkungan udara yang sehat, peningkatan daya saing serta mendorong investasi;
4. Rendahnya penggunaan angkutan umum perkotaan / pedesaan;
5. Perlunya pengembangan dan pemanfaatan transportasi masal berbasis jalan rel sebagai alternatif pergerakan orang dan barang.

Jika dikaitkan dengan persoalan yang dihadapi Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri, secara umum bidang trasportasi yang terdiri dari transportasi darat, udara dan sungai dihadapkan pada permasalahan berupa rendahnya kualitas dan cakupan layanan. Hal ini dicirikan antara lain berupa:

1. Rendahnya kapasitas ruas jalan dan tingginya hambatan samping di perkotaan;
2. Masih terbatasnya ketersediaan prasarana dan fasilitas perhubungan yang memadai;
3. Belum optimalnya proses pengendalian dan pengamanan lalu lintas;
4. Kurangnya penyediaan angkutan masal dan jaringan jalan rel;

5. Belum optimalnya efektifitas pengaturan jaringan dan simpul pelayanan angkutan;
6. Permasalahan utama bidang perhubungan adalah (1) Belum berkembangnya sistem transportasi massal dan integrasi antar moda angkutan; (2) Masih rendahnya ketersediaan aksessibilitas moda transportasi, (3) Jumlah penumpang angkutan umum yang masih rendah, (4) Masih kurangnya fasilitas perlengkapan jalan dan masih tingginya overloading angkutan barang(ODOL), (5) Belum adanya skylift truck untuk perbaikan lampu lalu lintas, (6) Belum adanya mobil uji keliling karena luasnya wilayah Kab. Kediri, (7) Rendahnya penggunaan angkutan umum yang di indikasikan dengan tingginya kepemilikan kendaraan pribadi dan banyaknya kendaraan online (grab, gojek, maxim dll).

Jika dilihat dari dampak tugas dan fungsi Dinas Perhubungan terhadap capaian visi dan misi Kepala Daerah maka tugas dan fungsi Dinas Perhubungan mendukung visi dan misi Bupati ke.5, yaitu "Peningkatan insfrastruktur dan konektivitas antar wilayah" sedangkan dampak terhadap capain program nasional/internasional, seperti SPM dan MDGs *(Millenium Development Goals)* yaitu meningkatkan kinerja pelayanan publik bidang perhubungan dengan merencanakan program/kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja VISI/MISI Bupati maupun capaian program nasional.

Tantangan dan peluang dalam mewujudkan peningkatan kinerja pelayanan bidang perhubungan dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Tantangan untuk mengoptimalkan pelyanan publik bidang perhubungan berbasis teknologi adalah adanya keterbatasan anggaran dan profesionalisme aparatur, sedangkan peluangnya masih adanya pemerataan dalam pendelegasian SDM dan budaya komunikasi yang luwes sehingga perencanaan per bidang saling terkait untuk mendukung satu tujuan.
2. Tantangan dalam mendukung pemerataan pembangunan perekonomian di Kabupaten Kediri yaitu penurunan aksesbilitas masyarakat terhadap pelayanan jasa transportasi, serta pertambahan jumlah penduduk yang berbanding lurus dengan kebutuhan penggunaan transportasi sedangkan peluangnya masih tersedianya pelayanan ijin trayek dan survey load factor yang bisa menjadi dasar penentuan permintaan masyarakat terhdap angkutan.
3. Tantangan untuk mendukung mewujudkan ketertiban dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan yaitu belum memiliki jaringan trayek yang terpadu antar moda, intra moda ataupun multi moda dan semakin berkembangnya kemajuan daerah, sedangkan peluangnya tersedianya SPM pelayanan di UPTD PKB yang cukup memadai.

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi kemajuan penyelenggaraan pembangunan dan pengembangan urusan pelayanan di sektor perhubungan. Berdasarkan realisasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri pada periode sebelumnya dan isu-isu di tingkat nasional maupun propinsi maka ada beberapa isu penting (isu strategis) bidang perhubungan yaitu :

1. Peningkatan dan perluasan akses sarana dan sistem transportasi moda jalan meliputi:

a. Rencana pembangunan jalan bebas hambatan Kertosono-Kediri (jalan tol Kediri – Nganjuk) yang menghubungkan Kabupaten Kediri dengan Kabupaten Nganjuk;
b. Rencana pembangunan jalan terkait bandara Kediri;
c. Jalan Tol Batu – Kediri;
d. Jalan Lingkar Wilis;
e. Rencana jalan lingkar Gampengrejo- Simpang Lima Gumul;
f. Akses menuju Bandara Kediri;
g. Akses transportasi terhadap tempat wisata;

2. Peningkatan kuantitas dan kualitas sumber daya aparatur bidang perhubungan secara komprehensif
3. Peningkatan pengadaan sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas seperti kendaraan operasional teknis bidang perhubungan, alat komunikasi, senter lalu lintas, helm, jas hujan dll;
4. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat dalam hal tertib dan disiplin berlalu lintas mengingat saat ini kesadaran masyarakat untuk mentaati peraturan lalu lintas cenderung menurun.
5. Pengarusutamaan gender dan perencanaan responsive gender masih dipandang kecil manfaatnya sehingga belum banyak program/kegiatan yang mengakomodir kepentingan tersebut.
6. Peningkatan pelaksanaan koordinasi antar instansi terkait sebagi upaya mewujudkan ketertiban dan keselamatan berlalu lintas;
7. Masih rendahnya peranan angkutan umum di dalam memperlancar mobilitas penduduk dari satu tempat ke tempat lain karena rendahnya standar pelayanan angkutan umum dan semakin maraknya angkutan online;
8. Peningkatan tindakan terhadap pengurangan emisi gas buang yang ditimbulkan dari asap kendaraan bermotor yang beroperasi di jalan raya guna menunjang program langit biru.
9. Belum berkembangnya penyediaan sistem angkutan umum massal yang terpadu dan berkelanjutan,baik yang berbasis jalan maupun non jalan;
10. Tingkat keselamatan lalu lintas jalan yang belum optimal;
11. Rendahnya kapasitas ruas jalan dan tingginya hambatan samping di perkotaan;
12. Belum termanfaatkannya teknologi informasi pada penyelenggaraan transportasi dengan optimal;
13. Belum terwujudnya pengembangan dan pembangunan prasarana dan fasilitas transportasi udara;
14. Perlunya peningkatan pengendalian dan penataan sistem transportasi.

Dari isu strategis tersebut di atas maka diperlukan strategi pembangunan sektor perhubungan dimana strategi tersebut merupakan rumusan dasar atau cara-cara yang perlu ditetapkan dengan memperhatikan lingkungan stratejik seperti kemampuan anggaran, potensi

pengembangan sektor perhubungan, sumber daya aparatur dan dukungan stakeholders, maka dapat diketahui langkah strategi dan kebijakan yang akan di ambil untuk pembangunan dan pengembangan sektor perhubungan di wilayah Kabupaten Kediri.

Atas dasar pertimbangan tersebut maka strategi pembangunan dan pengembangan sektor perhubungan yang dilakukan Dinas Perhubungan Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Penataan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kabupaten/Kota ;
2. Penataan penyusunan rencana induk jaringan LLAJ Kab./kota;
3. Pengawasan dan pengendalian efektifitas pelaksanaan kebijakan untuk jalan Kabupaten/Kota;
4. Forum lalu lintas dan angkutan jalan Kab./Kota;
5. Pelaksanaan penyusunan rencana Induk Jaringan Induk LLAJ;
6. Pengendalian pelaksanaan rencana induk jaringan induk LLAJ Kabupaten/Kota
7. Penyediaan perlengkapan jalan di jalan Kabupaten/Kota;
8. Rehabilitasi dan pemeliharaan perlengkapan jalan;
9. Koordinasi dan sinkronisasi penilaian Andalalin;
10. Penyediaan sarana prasarana Pengujian Kendaraan Bermotor;
11. Penyediaan bukti lulus uji pengujian kendaraan berkala kendaraan bermotor
12. Pemeliharaan sarana dan prasarana pengujian kendaraan bermotor
13. Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan berkala kendaraan bermotor
14. Pengendalian dan pengawasan ketersediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/ atau barang antar kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota;
15. Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir kewenangan Kabupaten/Kota.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Berikut ini beberapa hal penting dari Rancangan Awal RKPD yang menjadi landasan pembangunan kaitannya dengan rencana kerja Dinas Perhubungan, sebagai berikut:

a. Prioritas pembangunan daerah Kabupaten Kediri berdasarkan RPJPD Tahun 2005-2025:

   Tema pembangunan Tahun 2024 berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005 – 2025 adalah meningkatkan kualitas infrastruktur daerah yang mendukung pembangunan berkelanjutan. Jika di kaitkan dengan Rencana Kerja Dinas Perhubungan mempunyai sasaran pokok yaitu meningkatkan pelayanan transportasi daerah yang aman, lancar dan terpadu, dengan arah kebijakan yaitu meningkatan kelayakan dan keamanan penyelenggaraan transportasi, angkutan penumpang dan barang.

b. Prioritas pembangunan daerah Kabupaten Kediri Tahun 2024 berdasarkan rencana pembangunan daerah Tahun 2024:

   Dalam rangka mengarahkan proses pembangunan Kabupaten Kediri pada Tahun 2024, maka penentuan prioritas pembangunan di dasarkan kepada hal-hal berikut:

   1. Tujuan dan sasaran pembangunan dalam RPJMD yang diterjemahkan kedalam indikator sasaran agar dapat dicapai selama 5 tahun kedepan dari Tahun 2022-2026.

2. Program prioritas dalam RPJMD Tahun 2022-2026 sebagai penjabaran sasaran dan pencapaian indikator sasaran yang ingin dicapai.
3. Tema dan kebijakan pembangunan Tahun 2024 berdasarkan pada RPJMD Tahun 2022-2026 .
4. Permasalahan mendesak dan isu strategis pada Tahun 2024

Adapun prioritas pembangunan konektivitas di tahun 2024 berada pada misi peningkatan infrastruktur dan konektivitas antar wilayah dengan rincian program prioritas sebagai berikut: :

a. Program strategis nasional (PSN) Jalan Tol Kertosono- Kediri-Tulungagung, jalan tol SUBAKRI (Sukorejo – Batu – Kediri), aksesbilitas Bandara Kediri;
b. Jaringan jalur strategis antar wilayah, pusat, sub wilayah pengembangfan wilayah Kediri sekitarnya, meliputi:
    1. Selingkar Wilis Tulungagung-Nganjuk-Trenggalek-Ponorogo-MaDIUN-Kediri (Tunggal Rogo Mandiri);
    2. Jalan lereng Kelud (Kepung-Puncu-Plosoklaten-Ngancar);
    3. Jalan Surabaya-Jombang-Kediri-Blitar (melewati Pare dan Wates);
    4. Jalan Surabaya-Kediri-Blitar (melewati Kandat);
    5. Jalan Kediri-Nganjuk-Madiun;
    6. Jalan Malang-Kediri-Nganjuk-Madiun (melewati Papar);dan
    7. Jalan Kediri-Tulungagung-Trenggalek (melewati Mojo).
c. Peningkatan jaringan jalan strategis antar Kecamatan, Antar Desa dan Desa dengan Ibukota Kecamatan.

Berdasarkan hal tersebut di atas maka dapat kami sampaikan hasil review terhadap rancangan awal RKPD Tahun 2024 terhadap rencana program kegiatan Dinas Perhubungan Tahun 2024 lebih di fokuskan kepada " ***Pembangunan Infrastruktur Penunjang***",sebagaimana dijelaskan dalam tabel 2.5 sebagai berikut:

Tabel 2.5
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024
Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Anaslis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Prosentase pemenuhan Penunjang kebutuhan Urusan Pemerintahan Daerah**	**100%**	**10.782.459.546**	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Prosentase pemenuhan Penunjang kebutuhan Urusan Pemerintahan Daerah**	**100%**	**5.168.175.962**	
01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		**Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah**	**5 dokumen**	**7.835.200**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		**Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah**	**-**	**0**	
01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Wilayah Kabupaten Kediri	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	2 dok	3.887.800	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Wilayah Kabupaten Kediri	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	-	0	
01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Wilayah Kabupaten Kediri	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	3 dok	3.947.400	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Wilayah Kabupaten Kediri	Jumlah laporan evaluasi kinerja perngkat daerah	-	0	

No	Rancangan Awal RKPD	Hasil Analisis Kebutuhan	Catatan

	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**Jumlah pemenuhan administrasi keuangan perangkat daerah**	**12 bulan**	**8.891.369.349**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**Jumlah pemenuhan administrasi keuangan perangkat daerah**	**12 bulan**	**4.825.340.062**	
02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Wilayah Kabupaten Kediri	Jumlah org yang menerima gaji & tunjangan ASN	40 or/bln	6.910.308.349	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Wilayah Kabupaten Kediri	Jumlah org yang menerima gaji & tunjangan ASN	40 or/bln	4.228.131.062	
02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri	Jumlah dokumen hasil penyediaan adminstrasi pelaksanaan tugas ASN	12 dok	1.973.155.300	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri	Jumlah dokumen hasil penyediaan adminstrasi pelaksanaan tugas ASN	12 dok	597.209.000	
02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Wilayah Kabupaten Kediri	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD	8 laporan	1.585.300	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Wilayah Kabupaten Kediri	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD	-	0	
02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Wilayah Kabupaten Kediri	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan lap. Keuangan bln/triwulan/semesteran SKPD	12 laporan	6.320.400	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Wilayah Kabupaten Kediri	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan lap. Keuangan bln/triwulan/semesteran SKPD	-	0	
No.	**Rancangan Awal RKPD**					**Hasil Analisis Kebutuhan**					**Catatan**

											Penting
	Program/Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif (Rp)**	**Program/ Kegiatan**	Lokasi	**Indicator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif (Rp)**	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	8	**9**	**10**	**11**	**12**
05	**Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah**		**Jumlah pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah**	**12 bulan**	**163.500.336**	**Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah**		**Jumlah pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah**	**-**	**0**	
05.02	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri	Jumlah pengadaan pakaian dinas	200 paket	163.500.336	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri	Jumlah pengadaan pakaian dinas	-	0	
06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**Jumlah pemenuhan kebutuhan kepegawaian perangkat daerah**	**12 bulan**	**805.503.071**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**Jumlah pemenuhan kebutuhan kepegawaian perangkat daerah**	**12 bulan**	**190.697.100**	
06.01	Penyediaan komponen instansi listrik/penerangan bangunan kantor	Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri	Jumlah paket komponen instansi listrik/ penerangan bangunan kantor	4 paket	13.132.300	Penyediaan komponen instansi listrik/penerangan bangunan kantor	Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri	Jumlah paket komponen instansi listrik/ penerangan bangunan kantor	2 paket	4.615.000	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program Kegiatan	Lokasi	Indikator KInerja	Arget Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri	Jumlah paket penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 paket	133.506.471	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri	Jumlah paket penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	0	
06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri	Jumlah paket peralatan rumah tangga	25 paket	16.799.600	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri	Jumlah paket peralatan rumah tangga	14 paket	4.836.900	
06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri	Jumlah paket bahan logistik kantor	12 paket	14.845.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri	Jumlah paket bahan logistik kantor	6 paket	6.133.000	
06.05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan	12 paket	22.222.900	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan	7 paket	13.466.200	

No.	Rancangan Awal RKPD	Hasil Analisis Kebutuhan	

	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	12 bulan	4.800.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	-	0	
06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Wilayah Kabupaten Kediri	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi & konsultasi SKPD	80	600.196.800	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Wilayah Kabupaten Kediri	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi & konsultasi SKPD	60 laporan	161.646.000	
07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Wilayah Kabupaten Kediri	**Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah**	**16 unit**	**579.898.160**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah**	**-**	**0**	
	Pengadaan Mebel	Wilayah Kabupaten Kediri	Jumlah paket mebel		29.343.072	Pengadaan Mebel	Wilayah Kabupaten Kediri	Jumlah paket mebel	-	0	
07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Wilayah Kab. Kediri	Jumlah unit peralatan & mesin lainnya yg disediakan		233.159.410	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Wilayah Kab. Kediri	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yg disediakan	-	0	
07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Wilayah Kab. Kediri	Jumlah unit sarana prasarana pendukung Gedung kantor atau bangunan lainnya yg disedakan	1 paket	317.395.678	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Wilayah Kab. Kediri	Jumlah unit sarana prasarana pendukung Gedung kantor atau bangunan lainnya yg disedakan	-	0	
No.	**Rancangan Awal RKPD**					**Hasil Analisis Kebutuhan**					

											Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Jumlah pemenuhan jasa pendukung urusan pemerintah daerah**	**12 bulan**	**175.540.800**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Jumlah pemenuhan jasa pendukung urusan pemerintah daerah**	**12 bulan**	**96.865.000**	
08.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listirk	Wilayah Kab. Kediri	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 lapoaran	175.540.800	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listirk	Wilayah Kab. Kediri	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 laporan	96.865.000	
09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Jumlah jenis pemenuhan pemeliharaan barang milik daerah**	**9 jenis**	**158.812.630**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Jumlah jenis pemenuhan pemeliharaan barang milik daerah**	**3 jenis**	**55.273.800**	
09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Wilayah Kabupaten Kediri	Jumlah kendaraan perorangan dinas / kendaraan dinas jabatan yang dipeliharan & dibayarkan pajaknya	21 unit	68.074.100	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Wilayah Kabupaten Kediri	Jumlah kendaraan perorangan dinas / kendaraan dinas jabatan yang dipeliharan & dibayarkan pajaknya	21unit	37.773.800	
09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Wilayah Kabupaten Kediri	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yg dipelihara	65 unit	61.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Wilayah Kabupaten Kediri	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yg dipelihara	78 unit	17.500.000	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Wilayah Kabupaten Kediri	Jumlah gedung kantor & bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 unit	29.738.530	Pemeliharaan/Rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Wilayah Kabupaten Kediri	Jumlah gedung kantor &bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	0	0	
2	**Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan**		**Persentase ketersediaan kajian penyelenggaraan dan pengembangan bidang perhubungan**	**60,00 %**	**12.406.977.438**	**Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan**		**Persentase ketersediaan kajian penyelenggaraan dan pengembangan bidang perhubungan**	**60,00%**	**6.047.576.838**	
			Persentase ketersediaan perlengkapan jalan	**37,33 %**				**Persentase ketersediaan perlengkapan jalan**	**37,33%**		
			Persentase peningkatan ketertiban dan keselamatan LLAJ	**49,89 %**				**Persentase peningkatan ketertiban dan keselamatan LLAJ**	**49,89%**		
			Persentase angkutan jalan yang memenuhi standart keselamatan	**98%**				**Persentase angkutan jalan yang memenuhi standart keselamatan**	**98%**		

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01	**Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kab/Kota**		**Jumlah hasil kajian rencana induk jaringan LLAJ**	**1 dokumen**	**369.203.565**	**Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kab/Kota**		**Jumlah hasil kajian rencana induk jaringan LLAJ**	**1 dokumen**	**109.210.000**	
01.01	Pelaksanaan penyusunan rencana induk jaringan LLAJ Kab/Kota	Wilayah Kabupaten Kediri	Jumlah dokumen penyusunan rencana induk jaringan LLAJ Kab/Kota	1 dok	219.578.200	Pelaksanaan penyusunan rencana induk jaringan LLAJ Kab/Kota	Wilayah Kabupaten Kediri	Jumlah dokumen penyusunan rencana induk jaringan LLAJ Kab/Kota	1 dok	101.350.000	
	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk jaringan LLAJ Kab/Kota	Wilayah Kabupaten Kediri	Jumlah evaluasi (reviu) pelaksanaan rencana induk jaringan LLAJ Kab/Kota	1laporan	149.625.365	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk jaringan LLAJ Kab/Kota	Wilayah Kabupaten Kediri	Jumlah evaluasi (reviu) pelaksanaan rencana induk jaringan LLAJ Kab/Kota	1laporan	7.860.000	
02	**Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota**		**Jumlah perlengkapan jalan yang tersedia**	**115 unit**	**4.033.256.799**	**Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota**		**Jumlah perlengkapan jalan yang tersedia**	**39 unit**	**946.260.588**	
02.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Wilayah Kabupaten Kediri	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten	85 unit	2.550.623.019	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Wilayah Kabupaten Kediri	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten	31 unit	502.343.088	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
02.04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Wilayah Kabupaten Kediri	Jumlah Perlengkapan Jalan terehabilitasi & terpelihara	25 unit	1.482.633.780	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Wilayah Kabupaten Kediri	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten yang dipelihara	8 unit	443.917.500	
04	**Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir**		**Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi perparkiran**	**30 keg**	**3.261.064.250**	**Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir**		**Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi perparkiran**	**26 keg**	**2.684.981.250**	
04.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Wilayah Kabupaten Kediri	jumlah laporan koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan izin penyelenggaraan & terbangunnya fasilitas parkir	30	3.261.064.250	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Wilayah Kabupaten Kediri	jumlah laporan koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan izin penyelenggaraan & terbangunnya fasilitas parkir	26 lap	2.684.981.250	
05	**Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor**		**Jumlah pemenuhan kebutuhan PKB**	**5 unit**	**1.654.655.382**	**Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor**		**Jumlah pemenuhan kebutuhan PKB**	**9 unit**	**497.866.200**	
05.01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Wilayah Kabupaten Kediri	Jumlah sarpras PKB yg tersedia	5 unit	267.922.210	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Wilayah Kabupaten Kediri	Jumlah sarpras PKB yg tersedia	0 unit	4.646.200	
05.04	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Wilayah Kabupaten Kediri	Jumlah dok bukti lulus uji pengujian berkala kendraan bermotor	14.530 dok	445.780.000	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Wilayah Kabupaten Kediri	Jumlah dok bukti lulus uji pengujian berkala kendraan bermotor	6.032 dok	180.960.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
05.07	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Wilayah Kabupaten Kediri	Jumlah sarana dan prasarana PKB yang terpelihara	12 unit	804.836.472	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Wilayah Kabupaten Kediri	Jumlah sarana dan prasarana PKB yang terpelihara	9 unit	266.450.000	
05.10	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Wilayah Kabupaten Kediri	Jumlah laporan monev penyelenggaraan penguian berkala kendaraan bermotor	2 laporan	136.116.700	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Wilayah Kabupaten Kediri	Jumlah laporan monev penyelenggaraan penguian berkala kendaraan bermotor	2 lap	45.810.000	
06	**Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota**		**Jumlah kegiatan pelaksanaan manajemen rekayasa lalu lintas**	**30 keg**	**2.516.286.200**	**Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota**		**Jumlah kegiatan pelaksanaan manajemen rekayasa lalu lintas**	**24keg**	**1.784.011.800**	
06.01	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Wilayah Kabupaten Kediri	Jumlah lap.pelaksanaan Penataan Manrek. Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	7 lap	178.039.900	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Wilayah Kabupaten Kediri	Jumlah lap.pelaksanaan Penataan Manrek. Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	3 lap	6.960.000	
	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Untuk Jalan Kab/Kota	Wilayah Kabupaten Kediri	Jumlah laporan pengawaasan dan pengendalian efektifitas pelaksanaan kebijakan untuk Kab/Kota	20 lap	2.307.128.300	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Untuk Jalan Kab/Kota	Wilayah Kabupaten Kediri	Jumlah laporan pengawaasan dan pengendalian efektifitas pelaksanaan kebijakan untuk Kab/Kota	18 lap	1.773.511.800	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
06.05	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Wilayah Kabupaten Kediri	Jumlah laporan forum LLAJ	6 lap	31.118.000	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Wilayah Kabupaten Kediri	Jumlah laporan forum LLAJ	3 lap	3.540.000	
07	**Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota**		**Prosentase Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota**	**10 keg**	**33.319.500**	**Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota**		**Prosentase Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota**	**3 keg**	**3.182.000**	
07.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Wilayah Kabupaten Kediri	Jumlah laporan koordinasi dan sinkronisasi penilaian hasil ANDALALIN	10 laporan	33.319.500	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Wilayah Kabupaten Kediri	Jumlah laporan koordinasi dan sinkronisasi penilaian hasil ANDALALIN	3 lap	3.182.000	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
09	**Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**		**Jumlah kegiatan pengendaliaan dan pengawasan pelayanan angkutan orang/barang**	**12 kali keg**	**539.191.742**	**Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**		**Jumlah kegiatan pengendaliaan dan pengawasan pelayanan angkutan orang/barang**	**12 keg**	**22.065.000**	
09.02	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Wilayah Kabupaten Kediri	Jumlah laporan pengendalian dan pengawasan angkutan orang/barang	12 laporan	539.191.742	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Wilayah Kabupaten Kediri	Jumlah laporan pengendalian dan pengawasan angkutan orang/barang	12 laporan	22.065.000	
TOTAL ANGGARAN					**23.189.436.984**					**11.215.752.800**	

Adapun rincian usulan dari para pemangku kepentingan terkait urusan bidang perhubungan dapat dijelaskan sebagaimana tabel 2.6 berikut ini :

Tabel 2.6

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2023

Kabupaten Kediri

DINAS PERHUBUNGAN

No.	Program/ Kegiatan	Jenis	Lokasi	Volume	Total Vol.
1	2	3	4	5	6
02	**Program Penyelenggaraan LLAJ**				
2.02	Kegiatan Program Penyelenggaraan LLAJ				
2.02 .02	Sub Kegiatan:				
	Penyediaan perlengkapan jalan di Jalan Kab./Kota	Traffic Light	Simpang 4 Kunir Bulupasar	1 unit	2 unit
			Simpang 4 Sumberejo Kandat	1 unit	
		Warning Light	Simp. 4 Balai Desa Baye	1 unit	4 unit
			MTSN 9 Kediri	1 unit	
			Jl. Semeru Pare	1 unit	
			Simpang 3 Turus Gurah	1 unit	
		Pengecatan Marka	Marka Parkir Kec. Pare	1.000 m’	4.250 m’
			Jl. Brawijaya Pare	1.500m’	
			Dsn Ngancar Ds. Sugihwaras	1.750 m’	
		Rambu konvensional	Jl. PB. Sudirman	25 unit	50 unit
			Jl. Jawa Grogol	25 Unit	
		RPPJ	Simpang 4 Manuyaran Banyakan	4 unit	10 unit
			Simpang 4 Bulawen Tiron	4 unit	
			Simpang	1 unit	
			Simp. 3 Dsn. Singkil Ds. Medowo	1 unit	
		APILL terkoordinasi /ATCS	Simpang 4 Badas	1 paket	7 paket
			Simpang 3 Pasar Gringging	1 paket	
			Simpang 3 Sonorejo	1 paket	
			Simpang 4 Banyakan	1 paket	
			Simpang 3 Kras	1 paket	
			Simpang 3 Sambi	1 paket	
			Simpang 4 Kandangan	1 paket	
		Guardrail/ pagar pengaman Jalan	Jembatan Ds.Padangan Kec. KayenKidul	6 beam	6 beam

No.	Program/ Kegiatan	Jenis	Lokasi	Volume	Total Vol.
1	2	3	4	5	6
2.02 .04	Sub Kegiatan:				
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	RPPJ	Kawasan SLG	4 unit	7 unit
			Depan Kecamatan Pagu	1 unit	
			Simpang 4 Sukorejo Gurah	1 Unit	
			Simnpang 3 Pasar Karangdinoyo	1 Unit	
		Rambu Standart	Kawasan SLG	2 unit	18 unit
			Simp 4. Doko	2 unit	
			Jl. Brawijaya Pare	8 unit	
			Jl Matahari Pare	4 unit	
			Jl. Semeru	2 unit	
		APILL	TL Simp.3 Ngadiluwih	1 unit	8 unit
			FA Simpang 3 Pasar Wonokerto	1 unit	
			FA simp 3 gadungan Kec.Puncu	1 unit	
			FA Simpang 3 Mojokerep	1 unit	
			FA Simp.3 SMK Kertonegoro Wates	1 unit	
			FA simp 4 Ds. Cendono Kec.Kandat	1 unit	
			FA simp 4 Ngancar	1 unit	
			FA simp 4 Jabang Kras	1 unit	
		Rambu Elektronik	Simpang 3 Mojo	2 unit	2 unit
		Pemeliharaan CCTV	Simp 4 Papar	4 unit	18 Unit
			Simp 4 Branggahan	4 unit	
			Simp 4 Plemahan	4 unit	
			Kawasan SLG	6 unit	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat:

Ada beberapa usulan program dan kegiatan dari masyarakat melalui mekanisme MUSRENBANG kecamatan dalam forum SKPD. Usulan masyarakat tersebut ditujukan pada Program Pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan dan di realisasikan dalam kegiatan pengadaan dan perlengkapan jalan Tahun 2023.

Tidak semua usulan kegiatan dari masyarakat di akomodir dalam rencana usulan APBD Tahun 2023, mengingat keterbatasan APBD dalam mendukung kegiatan se-Kabupaten Kediri karena itu sebagian usulan kegiatan dari masyarakat ini di seleksi sesuai prioritas dan kewenangan Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri, apabila masih merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten Kediri akan di usulkan pada tahun berikutnya yang disesuaikan dengan anggaran yang ada. Jika usulan dari masyarakat termasuk kewenangan Provinsi di usulkan ke tingkat Provinsi dengan sumber pendanaan dari anggaran APBD Provinsi, demikian juga jika usulan tersebut merupakan kewenangan Kementrian Perhubungan maka akan di usulkan ke Kementrian Perhubungan Darat dengan sumber pendanaan dari anggaran APBN.

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN SKPD

Bab ini memuat telaah terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran renja Dinas Perhubungan pada tahun yang direncanakan (2024), serta rekapitulasi program dan kegiatan prakiraan maju Tahun 2025.

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan. Kebijakan nasional terkait urusan Perhubungan dilaksanakan oleh Kementerian Perhubungan Republik Indonesia sebagaimana dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.1
Identifikasi Kebijakan Nasional

No.	Kebijakan Nasional	Sumber
A.	**Keselamatan dan Keamanan**	Rencana Strategis Kemenhub 2020 - 2024
	1. Sasaran menurunnya angka kecelakaan transportasi dengan arah kebijakan meningkatkan keselamatan dalam penyelenggaraan transportasi	
	2. Sasaran menurunnya Jumlah gangguan keamanan dalam penyelenggaraan transportasi	
B.	**Pelayanan Transportasi**	Rencana Strategis Kemenhub 2020 -2024
	1. Sasaran meningkatnya kinerja pelayanan sarana dan prasarana transportasi, dengan arah kebijakan meningkatkan kinerja pelayanan sarana dan prasarana transportasi	
	2. Sasaran terpenuhinya SDM transportasi dalam Jumlah dan kompetensi sesuai dengan kebutuhan, dengan arah kebijakan memenuhi sdm transportasi dalam Jumlah dan kompetensi sesuai dengan kebutuhan	
	3. Sasaran meningkatnya kualitas penelitian sesuai dengan kebutuhan, dengan arah kebijakan meningkatkan kualitas penelitian transportasi	

No	Kebijakan Nasional	Sumber
	4. Sasaran meningkatnya kinerja capaian dalam mewujudkan *good governance*, dengan arah kebijakan mewujudkan transparansi dan akuntabilitas kinerja	
	5. Sasaran meningkatnya penetapan regulasi dalam implementasi kebijakan bidang perhubungan, dengan arah kebijakan meningkatkan kuantitas dan kualitas penetapan dan implementasi regulasi sektor transportasi	
	6. Sasaran menurunnya emisi gas rumah kaca (GRK) dan meningkatnya penerapan teknologi ramah lingkungan pada sektor tansportasi, dengan arah kebijakan menerapkan pembangunan sarana dan prasarana transportasi yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan	
	7. Sasaran meningkatnya kualitas kinerja pengawasan dalam rangka mewujudkan *clean governance*, dengan arah kebijakan pelaksanaan pengawasan intern yang berintegritas, professional dan amanah	
C.	**Kapasitas Transportasi**	Rencana Strategis Kemenhub 2020 - 2024
	1. Sasaran meningkatnya kapasitas sarana dan prasarana transportasi dan keterpaduan sistem transportasi antarmoda dan multimoda, dengan arah kebijakan meningkatkan kapasitas, konektivitas/aksesibilitas antar wilayah dan keterpaduan antarmoda/multimoda,	
	2. Sasaran meningkatnya layanan transportasi di daerah rawan bencana, perbatasan, terluar, terpencil dan khususnya di wilayah timur Indonesia, dengan arah kebijakan meningkatkan pengembangan sarana dan prasarana di daerah rawan bencana, perbatasan, terluar, terpencil dan khususnya di wilayah timur Indonesia	
	3. Sasaran Meningkatnya pelayanan angkutan umum massal perkotaan, dengan arah kebijakan mengembangkan sistem angkutan umum massal dengan orientasi kepada angkutan bus maupun rel dengan fasilitas alih modal terpadu	

	4. Sasaran meningkatnya aplikasi teknologi informasi dan skema sistem manajemen transportasi perkotaan, dengan arah kebijakan meningkatkan aplikasi teknologi informasi dalam sistem manajemen perkotaan	

Kebijakan nasional tersebut perlu ditelaah untuk menentukan kebijakan bidang perhubungan di level pemerintah Kabupaten. Telaah tersebut dimaksudkan untuk mensinergikan Kebijakan bidang perhubungan antara pusat dengan daerah sehingga berjalan selaras, efektif, dan efisien.

Kementrian Perhubungan menetapkan lima program prioritas yakni *pembangunan konektivitas trasnportasi mendukung sektor pariwisata, sektor logistik, daerah terpencil, perbatasan dan kepulauan, Ibu Kota Negara Baru serta pengembangan SDM***.** Penyusunan RKPD Kabupaten/Kota perlu melakukan telaahan atas kebijakan provinsi. Tahap ini menguraikan kebijakan provinsi berupa arah kebijakan dan fokus pembangunan di wilayah provinsi. Kesemuanya itu tertuang dalam RPJMD Provinsi maupun yang dirumuskan dalam RKPD Provinsi (rancangan awal) dan penelaahan pengaruhnya terhadap penyusunan RKPD Kabupaten/ Kota yang direncanakan. Kelima program Nasional/Provinsi tersebut telah di akomodir ke dalam program dan kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Perhubungan

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Dinas Perhubungan. Dengan demikian, tujuan dan sasaran pada Renja Dinas Perhubungan mengacu pada tujuan dan sasaran Renstra Dinas Perhubungan sebagaimana dijelaskan sebagai berikut:

3.2.1 T u j u a n

1. Meningkatkan profesionalisme SDM bidang perhubungan dan meningkatkan sikap interdependensi (saling ketergantungan) untuk mewujudkan sinergisitas dalam melaksanakan TUPOKSI bidang perhubungan
2. Mewujudkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan Sumber Daya yang ada serta meningkatkan kapasitas kelembagaan Dinas Perhubungan
3. Meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan jasa perhubungan secara adil dan merata dalam rangka mewujudkan pembangunan berkelanjutan
4. Mewujudkan kapasitas dan kualitas pelayanan jasa perhubungan yang handal, ramah lingkungan, dan dilengkapi dengan penggunaan teknologi informasi bidang transportasi untuk menunjang kinerja pelayanan.

3.2.2 S a s a r a n

1. Terwujudnya SDM perhubungan yang berkompetensi, bermoral, disiplin, memiliki dedikasi tinggi, dan bersinergis;

2. Terwujudnya efektivitas dan efisiensi pengelolaan sumber daya Perhubungan dan berjalannya reformasi kelembagaan secara berkala;
3. Terwujudnya pelayanan jasa perhubungan ke daerah-daerah sentra produksi pertanian dan industri, daerah wisata, daerah terpencil, dan meningkatnya keselamatan pengguna jalan melalui pemahaman tertib berlalulintas;
4. Terwujudnya sarana dan prasarana perhubungan, diterapkannya analisis dampak lingkungan dalam perencanaan transportasi, dan terlaksananya penerapan teknologi informasi dalam menunjang kinerja pelayanan jasa perhubungan.

3.3 Rekapitulasi Program dan Kegiatan Renja Dinas Perhubungan Tahun 2024

Penyusunan program dan kegiatan yang tercantum dalam rencana kerja tahun 2024 dalam proses pembuatannya memperhatikan beberapa faktor yaitu;

(1) Pencapaian visi dan misi Kepala Daerah,

Program Kegiatan Dinas Perhubungan mendukung visi Bupati “Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Kediri yang Maju, Berkarakter Nasionalis-Religius, sera Sejahtera Berdasarkan Ekonomi Kerakyatan yang di dukung birokrasi yang melayani” dan misi nomor 5 yaitu ”Peningkatan infrastruktur dan konektivitas antar - wilayah”, dimana bidang perhubungan bertujuan untuk meningkatkan kelancaran dan keamanan transportasi serta memenuhi kebutuhan sarana prasarana lalu lintas angkutan jalan di wilayah Kabupaten Kediri.

(2) Pencapaian Standar Pelayanan Minimal,

Standar Pelayanan Minimal pada dinas perhubungan setiap tahun dilaksanakan melalui kegiatan monitoring dan evaluasi dengan melaksanakan survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang bertujuan untuk peningkatan dan pengembangan pelayanan publik bidang perhubungan.

(3) Pendayagunaan potensi ekonomi daerah, dan

Guna mendukung potensi ekonomi daerah, Dinas Perhubungan membantu ketertiban , kelancaran dan keselamatan transportasi atau pengguna jalan melalui kegiatan Pengadaan Perlengkapan Jalan dan Operasional Penertiban Lalu Lintas Angkutan Jalan

(4) Peningkatan pelayanan publik berbasis IT

Upaya Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri dalam meningkatkan pelayanan publik berbasis IT bidang perhubungan yaitu dengan melaksanakan pengembangan sistem informasi bidang perhubungan berbasis IT yang dirintis dengan mengoptimalkan pengembangan E-Dishub dan SIM PKB serta peningkatan operasional ATCS.

Berdasarkan pada kebijakan Pemerintah Daerah dan adanya penyesuaian terhadap penyederhanaan program/kegiatan dan adanya refocusing anggaran Tahun Anggaran 2024, maka semula jumlah alokasi pagu anggaran yaitu sebesar Rp.24.460.644.003,00 menjadi Rp. 11.215.752.800,00 dan perkiraan pagu anggaran untuk tahun 2025 sejumlah Rp.24.862.304.918,00 sebagaimana terinci dalam tabel 3.2 berikut ini:

Tabel 3.2

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025 Kabupaten Kediri

Kode Rek	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Prosentase pemenuhan Penunjang kebutuhan Urusan Pemerintahan Daerah**		**100%**	**5.168.175.962**	APBD		**100%**	**10.394.315.241**
01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah**			**0**	APBD		**10 dokumen**	**7.836.900**
01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Wilayah Kabupaten Kediri		0	APBD		3 dokumen	3.889.900
01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi perangkat daerah	Wilayah Kabupaten Kediri		0	APBD		7 dokumen	3.947.000
02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah pemenuhan administrasi keuangan perangkat daerah**		**12 bulan**	**4.825.340.062**	APBD		**12 bulan**	**8.977.204.864**
02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yg menerima gaji & tunjangan ASN	Wilayah Kabupaten Kediri	12 bulan	4.228.131.062	APBD		49 OB	6.910.307.464
02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri	12 bulan	597.209.000	APBD		12 bulan	2.058.991.900

Kode Rek	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun skpd	Wilayah Kabupaten Kediri		0	APBD		8 dokumen	2.258.500
02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan keuangan bulanan/bln/triwulan/semesteran SKPD	Wilayah Kabupaten Kediri		0	APBD		12 dokumen	5.647.000
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah								
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	jumlah penerimaan honor jasa pengelola barang	Wilayah Kabupaten Kediri		0	0		0	0
05	**Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah**	**Jumlah pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah**			**0**	APBD		**193 paket**	**154.400.000**
05.02	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah paket pengadaan pakaian dinas	Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri		0	APBD		193 paket	154.400.000
06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah pemenuhan kebutuhan umum perangkat daerah**		**12 bulan**	**190.697.100**	APBD		**12 bulan**	**487.261.788**
06.01	Penyediaan komponen instansi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah paket komponen instansi listrik/ penerangan bangunan kantor yg disediakan	Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri	12 bulan	4.615.000	APBD		12 bulan	14.427.300
06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yg disediakan	Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri			APBD		12 bulan	107.004.888

Kode Rek	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga yg disediakan	Jumlah paket peralatan rumah tangga	Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri	14 paket	4.836.900	APBD		20 paket	17.239.500
06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor yg disediakan	Jumlah paket bahan logistik kantor	Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri	6 paket	6.133.000	APBD		12 paket	16.626.900
06.05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan	Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri	7 paket	13.466.200	APBD		10 paket	22.279.000
06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang undangan yg disediakan	Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri	12 dokumen	0	APBD		12 dokumen	4.837.200
06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi & konsultasi SKPD	Wilayah Kabupaten Kediri	60 laporan	161.646.000	APBD		80 laporan	304.847.000
07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah**		**0**	**0**	APBD			**433.696.789**
	Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yg disediakan	Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri		0	APBD		5 paket	15.695.400
07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yg disediakan	Wilayah Kab. Kediri		0	APBD		15 unit	

Kode Rek	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pengadaan sarana prasaranagedung kantor	Wilayah Kab. Kediri		0	APBD		1 paket	100.000.000
08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah pemenuhan jasa pendukung urusan pemerintah daerah**		**12 bulan**	**96.865.000**	APBD		**12 bulan**	**165.000.000**
08.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listirk	Jumlah pemenuhan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Wilayah Kab. Kediri	12 bulan	96.865.000	APBD		12 bulan	165.000.000
09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah pemenuhan pemeliharaan barang milik daerah**		**95 unit**	**55.273.800**	APBD		**95 unit**	**188.850.000**
09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas yang dipeliharan	Wilayah Kabupaten Kediri	29 unit	37.773.800	APBD		28 Kendaraan	60.000.000
09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara	Wilayah Kabupaten Kediri	65 unit	17.500.000	APBD		72 unit	53.850.000
09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi gedung kantor & bangunan lainya yg dpelihara	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yg dipelihara	Dinas Perhubungan	-	-	APBD		1 unit	30.000.000

Kode Rek	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	**Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan**	**Persentase ketersediaan kajian penyelenggaraan dan pengembangan bidang perhubungan**		**60,00%**	**6.047.576.838**	APBD		**80,00%**	**12.795.121.743**
		Persentase ketersediaan perlengkapan jalan		**37,33%**				**77,17%**	
		Persentase peningkatan ketertiban dan keselamatan LLAJ		**49,89%**				**87,50%**	
		Persentase angkutan jalan yang memenuhi standart keselamatan		**98,00%**				**98,00%**	
01	**Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kab/Kota**	**Jumlah hasil kajian rencana induk jaringan LLAJ**		**1 dokumen**	**109.210.000**	APBD		**1 dokumen**	**329.617.065**
01.01	Pelaksanaan penyusunan rencana induk jaringan LLAJ Kab/Kota	Jumlah dokumen penyusunan RIJ LLAJ Kab/.Kota	Wilayah Kabupaten Kediri	1 dok	101.350.000	APBD		1 dok	219.598.600
	Pengendalian Pelaksanaan rencana induk jaringan LLAJ Kab/Kota	Jumlah evaluasi (reviu) pelaksnaan RIJ LLAJ Kab/Kota	Wilayah Kabupaten Kediri	1 keg	7.860.000			1 laporan	110.018.465
02	**Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota**	**Jumlah perlengkapan jalan yang tersedia**		**59 unit**	**946.260.588**	APBD		**62 unit**	**3.324.128.228**
02.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten	Wilayah Kabupaten Kediri	10 unit	502.343.088	APBD		50 unit	2.239.910.778
02.04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten yang dipelihara	Wilayah Kabupaten Kediri	8 unit	443.917.500	APBD		12 unit	1.084.217.450

Kode Rek	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
04	**Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir**	**Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi perparkiran**		**4 keg**	**2.684.981.250**	APBD		**4 keg**	**3.260.658.250**
04.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah laporan koordinasi dan sinkronisasi perparkiran	Wilayah Kabupaten Kediri	26 laporan	2.684.981.250	APBD		26 laporan	3.260.658.250
05	**Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor**	**Jumlah pemenuhan kebutuhan sarpras PKB**		**5 unit**	**497.866.200**	APBD		**16 unit**	**3.067.553.600**
05.01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah sarpras PKB yg tersedia	Wilayah Kabupaten Kediri	0 unit	4.646.200	APBD		5 unit	269.393.100
05.04	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah ketersediaan kartu uji/smartcard	Wilayah Kabupaten Kediri	6.032 dok	180.960.000	APBD		24.750 dok	438.880.000
05.07	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah sarana dan prasarana PKB yang dipelihara / direhab	Wilayah Kabupaten Kediri	9 unit	266.450.000	APBD		11 unit	2.238.150.000
05.10	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah laporan monev penyelenggaraan pengujian berkala kend.bermotor	Wilayah Kabupaten Kediri	2 laporan	45.810.000	APBD		2 laporan	121.130.500
06	**Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota**	**Jumlah kegiatan pelaksanaan manajemen rekayasa lalu lintas**		**10 keg**	**1.784.011.800**	APBD		**10 keg**	**2.503.770.600**
06.01	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah lapora pelaksanaan manreks lalin unt jaringan jalan Kab/Prop	Wilayah Kabupaten Kediri	3 lap	6.960.000	APBD		10 lap	164.999.900

Kode Rek	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Pengawasan dan Pengendalian Efektifitas Pelaksanaan Kebijakan untuk jalan Provinsi	Jumlah laporan pengawasan & pengendalian efektifitas pelaksanaan kebijakan unt jalan Kab/Kota	Wilayah Kabupaten Kediri	18 lap	1.773.511.800			18 lap	2.307.703.700
06.05	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan forum LLAJ unt jaringan jalan Kab/Kota	Wilayah Kabupaten Kediri	3 laporan	3.540.000	APBD		10 laporan	31.067.000
07	**Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota**	**Jumlah Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota**		**3 keg**	**3.182.000**	APBD		**10 keg**	**33.319.500**
07.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Jumlah laporan koordinasi dan sinkronisasi hasil ANDALALIN	Wilayah Kabupaten Kediri	3 lap	3.182.000	APBD		10 laporan	33.319.500
09	**Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah kegiatan pengendaliaan dan pengawasan pelayanan angkutan orang/barang**		**12 laporan**	**22.065.000**	APBD			**276.0740500**
09.02	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pengendalian dan pengawasan angkutan orang/barang	Wilayah Kabupaten Kediri	12 lapoan	22.065.000	APBD			276.0740500
TOTAL ANGGARAN					**11.215.752.800**				**23.189.436.984**

Adapun gambaran pengadaan sarana prasarana lalu lintas mulai tahun 2013 sampai dengan tahun 2023 dapat dilihat dari rekapitulasi pengadaan perlengkapan jalan mulai tahun 2019 (tahun 2013-tahun 2019) sampai dengan tahun 2023, sebagaimana terlihat dalam tabel 3.3 berikut ini :

Tabel 3.3

Rekapitulasi Pengadaan Sarana Prasarana Lalu Lintas sampai dengan 2023

No.	JENIS PENGADAAN	TAHUN PENGADAAN					TOTAL	
		S/D 2019	2020	2021	2022	2023		
1	Rambu Standar	1.016	5	21	72	40	1.154	unit
2	RPPJ	84		6	6	3	99	unit
3	Pengadaan Guardrail	111			6		117	beam
4	Pengadaan APILL (FA)	50		3	13	4	70	unit
5	Pengadaan APILL (TL)	3			1	1	5	unit
6	Pengadaan APILL (PCTL)	1					1	unit
9	Pengadaan Paku Jalan Bulat	3.163					3163	bh
10	Pengadaan Paku Marka Solar cell	80					80	bh
11	Pengadaan CCTV	22			4	6	32	unit
12	Pengadaan Cermin Tikungan	47					47	unit
13	Pengadaan & Pemasangan Running Text	3					3	unit
14	Pengadaan MSD	84					84	unit
16	Pengadaan Deliniator	1.626					1626	
17	Pengecatan Marka	0		9	19		28	Titik lokasi
18	Upgrade ATCS	0	3	1	1	1	6	unit
19	Pengadaan Monopole	4					4	unit
20	Palang Pintu KA	0			1		1	unit
21	Pos Jaga KA	0			1		1	unit

Sumber Data: Bidang Lalin (DISHUB) tahun 2023

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SKPD

Rencana kerja dan pendanaan SKPD merupakan dokumen yang menjelaskan terkait progam / kegiatan dan pendanaan SKPD dalam satu tahun anggaran. Program adalah penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD selama satu tahun. Kegiatan SKPD adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh SKPD untuk menghasilkan keluaran (output) dalam rangka mencapai hasil (outcome) suatu program.

Rencana program dan kegiatan prioritas Dinas Perhubungan Tahun 2024 berisi program dan kegiatan prioritas guna mencapai secara langsung sasaran pembangunan untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan bidang perhubungan jangka menengah maupun untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai kewenangan daerah. Pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah Jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program dan kegiatan tahunan. Program dan kegiatan prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan (pagu indikatif) selanjutnya dijadikan acuan bagi SKPD.

Pelaksanaan rencana kerja berupa program/kegiatan Dinas Perhubungan sebagai instrument pelaksanaan dari program Tahun 2024 yang harus dilaksanakan secara efisien dan efektif sehingga diperlukan keterpaduan dan sinkronisasi kegiatan yang telah diprogramkan serta dilakukan dengan memanfaatkan forum perencanaan, rapat koordinasi dan penjaringan aspirasi masyarakat sehingga tercapai sinergi dalam pelaksanaannya dengan tetap menerapkan prinsip-prinsip safe guarding yaitu transparansi, akuntabilitas, partisipasi, monitoring dan evaluasi.

Efektifitas pelaksanaan program perlu dijaga dengan melakukan monitoring dan evaluasi pada setiap tahapan agar diperoleh hasil maksimal serta sebagai umpan balik bagi perencanaan tahap berikutnya. Perencanaan program dan kerja Dinas Perhubungan di Tahun 2024 ditetapkan berdasarkan pertimbangan hasil evaluasi di tahun sebelumnya dan disesuaikan dengan usulan masyarakat ataupun perkembangan tuntutan teknologi dan informasi di sektor tranportasi, akan tetapi karena adanya rasionalisasi anggaran maka perencanaan anggaran tahun 2024 disesuaikan dengan tersedianya anggaran yang ada sehingga ada beberapa kegiatan/sub kegiatan tidak teranggarkan. Tahun 2024 jumlah program ada 2 (dua) program yang terinci dalam 11 kegiatan dan 24 sub kegiatan. Penyebaran program terkait sarana dan prasarana lalu lintas meliputi wilayah se-Kabupaten Kediri, disamping itu juga tersebar di desa / kecamatan yang telah dilakukan kajian awal perencanaan kebutuhan sarana prasarana lalu lintas. rencana kerja berdasarkan program dan kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri Tahun 2024 dapat dijelaskan sebagaimana table 4.1 berikut :

TABEL 4.1

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SKPD TAHUN 2024

No.	PROGRAM / KEG/SUB KEG	INDIKATOR PROGRAM dan KEGIATAN	PAGU INDIKATIF (Rp.)	SUMBER DANA
1	2	3	4	5
1	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Prosentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan Pemerintahan Daerah**	**5.168.175.962**	APBD
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah pemenuhan administrasi keuangan perangkat daerah	**4.825.340.062**	APBD
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah org yang menerima gaji dan tunjangan penghasilan PNS	4.228.131.062	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	597.209.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	**190.697100**	APBD
	Penyediaan komponen instansi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlahh paket komponen instansi listrik/penerangan bangunan kantor yg disediakan	4.615.000	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yg disediakan	4.836.900	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor	6.133.000	
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan	13.466.200	
	Penyelenggaraan rapat koorinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah laporan Penyelenggaraan rapat koorinasi dan konsultasi SKPD	161.646.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemda	**96.865.000**	APBD
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah laporan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	96.865.000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daeah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah jenis pemeliharaan BMD penunjang Urusan Pemda**	**55.273.800**	APBD
	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah Kendaran Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan Yang Dipelihara Dan Dibayarkan Pajaknya	37.773800	
	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yg diperlihara	17.500.000	
	Program Penyelenggaraan LLAJ	**Prosentase Penyelenggaraan LLAJ**	**6.047.576.838**	APBD
	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kab/Kota	% Pemenuhan penetapan rencanan induk jaringan LLAJ Kab.Kediri	**109.210.000**	APBD
	Pelaksanaan penyusunan rencana induk jaringan LLAJ Kab/Kota	Jumlah kajian rencana induk jaringan LLAJ	101.350.000	
	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk jaringan LLAJ Kab/Kota	Jumlah kegiatan pelaksanaan RIJ	7.860.000	

No.	PROGRAM / KEG/SUB KEG	INDIKATOR PROGRAM dan KEGIATAN	PAGU INDIKATIF (Rp.)	SUMBER DANA
1	2	3	4	5
	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	% Pemenuhan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kab/Kota	**946.260.588**	APBD
	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kab/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	502.343.088	
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	443.917.500	
	Penerbitan ijin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir	***Prosentase penerbitan ijin penyelenggaraan pembnagunan fasilitas parkir***	**2.684.981.250**	APBD
	Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan ijin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitasn parkir kewenangan Kab/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	2.684.981.250	
	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	***% Pemenuhan Kebutuhan Pengujian Kendaraan Bermotor***	**497.866.200**	APBD
	Penyediaan Sarana dan Prasarana PKB	umlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	4.646.200	
	Penyediaan Bukti Lulus Uji PKB	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	180.960.000	
	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana PKB	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	266.450.000	
	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan PKB	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	45.810.000	
	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk jaringan jalan Kab./kota	***Prosentase Pelaksanaan Manajemen& Rekayasa Lalin untuk jaringan jalan Kabupaten/Kota***	***1.784.011.800***	APBD
	Penataan Manajemen & Rekayasa Lalu Lintas untuk jaringan jalan Kab/Kota	Jumlah pelaksanaan manajemen dan rekayasa LALIN unt jaringan jalan Kab/Kota	6.960.000	
	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Untuk Jalan Kab/Kota	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	1.773.511.800	
	Forum Lalu lintas dan angkutan jalan	Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	3.540.000	
	Persetujuan Hasil Analisis Dampak lalu Lintas untuk jalan Kab/Kota	***Prosentase persetujuan hasil ANDALALIN***	***3.182.000***	APBD
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	3.182.000	
	Penyediaan Angkutan Umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar kota dalam1 (satu) daerah Kab/Kota	***Prosentase Kebutuhan sarpras Angkutan Umum untuk jasa angkutan orang dan atau barang antar kota dalam 1 (satu) daerah Kab/Kota***	***22.065.000***	APBD
	Pengendalian dan pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa angkutan orang dan/atau barang antar kota dalam 1(satu) Kab/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	22.065.000	
TOTAL ANGGARAN			**11.215.752.800**	

Sehubungan dengan adanya fungsi sebagai dinas penghasil maka Dinas Perhubungan merencanakan penerimaan pendapatan asli daerah bidang perhubungan tahun 2024 sebagaimaan tabel 4.2 berikut:

Tabel 4.2

RENCANA PENERIMAAN PAD DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN KEDIRI

TAHUN 2024

RINGKASAN ANGGARAN PENDAPATAN SKPD										KET.
Kode Rekening					Uraian	Volume	Satuan	Tarif/ Harga	Jumlah	
1					2	3	4	5	6 (3 x 5)	
4					**PENDAPATAN**				**21.354.400.650**	
4	**1**				**PENDAPATAN ASLI DAERAH**				**21.354.400.650**	
4	**1**	**2**			**Hasil Retribusi Daerah**				**21.354.400.650**	
4	**1**	**2**	**01**		**Retribusi Jasa Umum**				**21.346.890.000**	
4	**1**	**2**	**01**	**19**	**Retribusi Pelayanan Parkir di tepi jalan umum**					
					- Ret. parkir reguler khususnya roda 2	54.750	kend	1.000	54.750.000	
					- Ret. parkir reguler khususnya roda 4	46.020	kend	2.000	92.040.000	
					- Ret. parkir reguler khususnya roda 4 atau lebih	10.950	kend	4.000	43.800.000	
					- Ret. sistem parkir berlangganan khususnya roda 2	705.782	kend	25.000	17.644.550.000	
					- Ret. sistem parkir berlangganan khususnya roda 4	70.235	kend	50.000	3.511.750.000	
4	**1**	**2**	**02**		**Retribusi Jasa Usaha**				**7.510.650**	
4	**1**	**2**	**02**	**01**	**Retribusi pemakaian kekayaan daerah**				**7.510.650**	
					Retribusi penyewaan tanah				7.510.650	
					- Sewa lahan tanah pertanian	5.007,1	bln/m2			

BAB V
PENUTUP

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri Tahun 2024 telah di uraikan hasil pembangunan urusan pemerintahan bidang perhubungan tahun lalu serta Rencana Kerja tahun 2024. Pelaksanaan mekanisme pengamanan program dapat dilakukan melalui prinsip *safeguarding* (tindak pengamanan) melaui penerapan prinsip-prinsip transparansi, akuntabillitas dan partisipasi/peran serta masyarakat luas untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Prinsip transparansi diwujudkan dalam bentuk kegiatan penyebaran informasi, prinsip akuntabilitas diwujudkan melalui pembentukan unit pengaduan masyarakatat dan prinsip partisipasi di operasionalkan melalui penyelenggaraan forum lintas pelaku (pemerintah dan masyarakat) guna mendukung pencapaian pembangunan daerah yang lebih luas,sehingga diperlukan produk kebijakan atau peraturan perundangan yang khusus di buat untuk mendukung *safeguarding*.

Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri Tahun 2024 ini merupakan rencana kerja tahunan dalam menunjang tercapainya Visi dan Misi Bupati serta target dan Sasaran Pembangunan yang dioperasionalkan melalui Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kediri Tahun 2024. Rencana Kerja ini dimaksudkan sebagai bahan dalam penyusunan usulan rencana kegiatan fasilitasi pembangunan yang bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2024 dan untuk mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu.

Renja ini, diharapkan penyelenggaraan program/kegiatan Dinas Perhubungan dapat dilaksanakan secara akuntabel, terukur, efektif dan efisien serta disesuaikan rencana realisasi anggaran yang sudah ditetapkan.

Kediri, 11 - 08 - 2023

Plt. KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN KEDIRI

JOKO SUWONO
Pembina Utama Muda
NIP. 19750103 199311 1 001

BUPATI KEDIRI,

HANINDHITO HIMAWAN PRAMANA